



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)



RINGKASAN

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN**

Food Security and Vulnerability Atlas

2025

RINGKASAN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

Food Security and Vulnerability Atlas

2025





**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223.1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:
- a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
 - b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
7. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
8. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia;
dan
14. Direktur Utama Perum BULOG.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223.1 TAHUN 2025
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025





BAB 1

PENDAHULUAN

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDG-1 adalah pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 adalah mengakhiri kelaparan. Pencapaian kedua target tersebut dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, dan reformasi sistem pertanian ke arah yang lebih resilien dan berkelanjutan. Indikator tercapainya tujuan ini adalah apabila setiap orang, termasuk warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi, lansia, dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pangan dalam konteks mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Energi, utamanya pada Indonesia Emas/IE-16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari RPJPN Tahun 2025-2045 secara khusus menekankan pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi ini merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan merupakan bagian penting dan strategis untuk turut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian target SDGs dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut diperlukan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat serta fokus terhadap sasaran. Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini masalah pangan dan potensi kerawanan pangan dan gizi. Data dan informasi tentang



ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif, akurat, dan mutakhir dapat menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung peran tersebut. Badan Pangan Nasional terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi dalam penyediaan data dan informasi, salah satunya melalui penyediaan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), yaitu peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. Penyusunan FSVA bertujuan untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, sehingga dapat memberi arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

FSVA tidak saja mengilustrasikan kondisi ketahanan pangan pada berbagai tingkatan wilayah/daerah, melainkan juga tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan. Oleh karena itu, FSVA menjadi alat strategis (*strategic tools*) bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pangan serta mendukung penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pangan di wilayah masing-masing. Selain karakteristik wilayah tahan atau rentan pangan, peta ini pun memuat rekomendasi yang bersifat preskriptif untuk mempertahankan dan memperbaiki situasi ketahanan pangan.

FSVA disusun secara berjenjang di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. FSVA Nasional disusun dengan level analisis tingkat kabupaten/kota, FSVA Provinsi disusun dengan level analisis tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota disusun dengan level analisis tingkat desa/kelurahan. FSVA menyajikan informasi komprehensif lintas sektoral yang disajikan dalam bentuk peta tematik. Penyusunan FSVA dimotori dan dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi aktif adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Perum BULOG. Di tingkat daerah penyusunannya melibatkan dinas/kantor/unit kerja yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, penyusunan FSVA ini dari pertama kali dilakukan bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP), perguruan tinggi, dan pakar.

Sejak pemerintahan Kabinet Merah Putih, penyusunan FSVA 2025 juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. *Output* FSVA berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan persentase daerah rentan pangan menjadi indikator RPJMN 2025-2029 Kabinet Merah Putih. *Output* ini juga menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) Urusan Pangan Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



BAB 2

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN FSVA

Penyusunan FSVA tingkat nasional dimulai dengan diterbitkannya Peta Kerawanan Pangan atau *Food Insecurity Atlas* (FIA) pada tahun 2005. Penyusunan FIA merupakan hasil kerja sama antara Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan dengan WFP yang dimulai sejak tahun 2002.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi tentang kerentanan pangan di daerah dan untuk mengatasi kesalahpahaman dari pimpinan daerah tentang istilah “rawan pangan” yang melekat pada judul buku FIA, pada tahun 2009 BKP Kementan melanjutkan kerja sama dengan WFP menyusun dan menerbitkan FSVA. Selain menambahkan informasi tentang status situasi ketahanan pangan setempat, penggunaan istilah rawan pangan juga diganti dengan “kerentanan terhadap rawan pangan”. Indikator yang digunakan masih sama dengan indikator FIA tahun 2005, kecuali angka kematian bayi yang tidak digunakan lagi karena data tidak tersedia.

Kualitas FSVA terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan untuk melayani kebutuhan pengguna dan situasi serta perkembangan lingkungan strategis pembangunan nasional dan global, khususnya dalam menentukan fokus dan program utama penanganan kerawanan pangan. Peningkatan kualitas FSVA terutama terkait dengan penyempurnaan indikator yang digunakan agar menjadi lebih sederhana, namun lebih tajam dan akurat dalam merepresentasikan kondisi ketahanan dan kerentanan terhadap rawan pangan di suatu daerah. Pertimbangan lain dalam perubahan yang dilakukan adalah kesinambungan ketersediaan data. Salah satu yang disesuaikan pada FSVA 2015, yaitu indikator pengukuran pertumbuhan balita yang semula menggunakan prevalensi gizi kurang (BB/U) diubah menjadi prevalensi *stunting* (TB/U) untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi kronis serta mendukung program pemerintah untuk mengentaskan *stunting*.

Pada penyusunan FSVA tahun 2018, penyempurnaan beberapa indikator kembali dilakukan. Terdapat 3 (tiga) perubahan indikator yang signifikan yaitu: (a) persentase desa dengan akses penghubung yang tidak memadai diganti dengan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang tinggi, (b) persentase perempuan di atas 15 tahun yang buta huruf diganti menjadi rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun, dan (c) persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 (lima) kilometer dari fasilitas kesehatan diganti menjadi rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Ketiga indikator tersebut secara konsisten digunakan hingga penyusunan FSVA 2024.

Pada tahun 2024 proses pemutakhiran metodologi FSVA kembali dilakukan melalui serangkaian konsultasi nasional, tinjauan ilmiah dan teknis, serta lokakarya finalisasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat provinsi dan kabupaten. Pemutakhiran dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya penyesuaian indikator yang selama ini digunakan dengan kebutuhan peningkatan pemanfaatan FSVA khususnya dalam hal penguatan cadangan pangan, peningkatan kualitas ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat khususnya yang berbasis sumberdaya lokal, serta keamanan pangan yang semakin menjadi prioritas pembangunan saat ini dan ke depan. Upaya ini dilakukan agar FSVA tetap dapat menjadi tolok ukur pencapaian ketahanan pangan nasional dan tingkat daerah secara akurat, terpercaya, dan relevan dengan kondisi serta program kerja pemerintah di bidang ketahanan pangan terkini. Proses pemutakhiran ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk

memungkinkan penerapan kerangka kerja FSVA yang modern dan responsif didalam mengukur situasi ketahanan pangan. Pemutakhiran dilakukan untuk meningkatkan kemampuan FSVA dalam menetapkan intervensi yang lebih terarah dan berbasis bukti, sehingga tidak ada wilayah dan masyarakat rentan yang tertinggal. Secara khusus perubahan metodologi didasari oleh:

1. Modernisasi Indikator

Modernisasi indikator untuk memotret kondisi ketahanan pangan berkelanjutan sesuai perkembangan global dan mencerminkan realitas yang faktual. Lanskap pangan Indonesia tengah mengalami evolusi yang cepat. Pemutakhiran FSVA menampilkan serangkaian indikator yang lebih komprehensif dan akurat mencerminkan tantangan saat ini, termasuk cadangan pangan regional, volatilitas harga pangan, kualitas makanan, keamanan pangan, serta ketersediaan protein dan energi dari sumber pangan lokal. Indikator-indikator tersebut selaras dengan prioritas nasional terkini, yaitu mendukung pencapaian visi Indonesia Emas dan mendukung pencapaian target Prioritas Nasional 2 (dua)/PN-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

2. Mengacu konsep dan standar pengukuran ketahanan pangan internasional

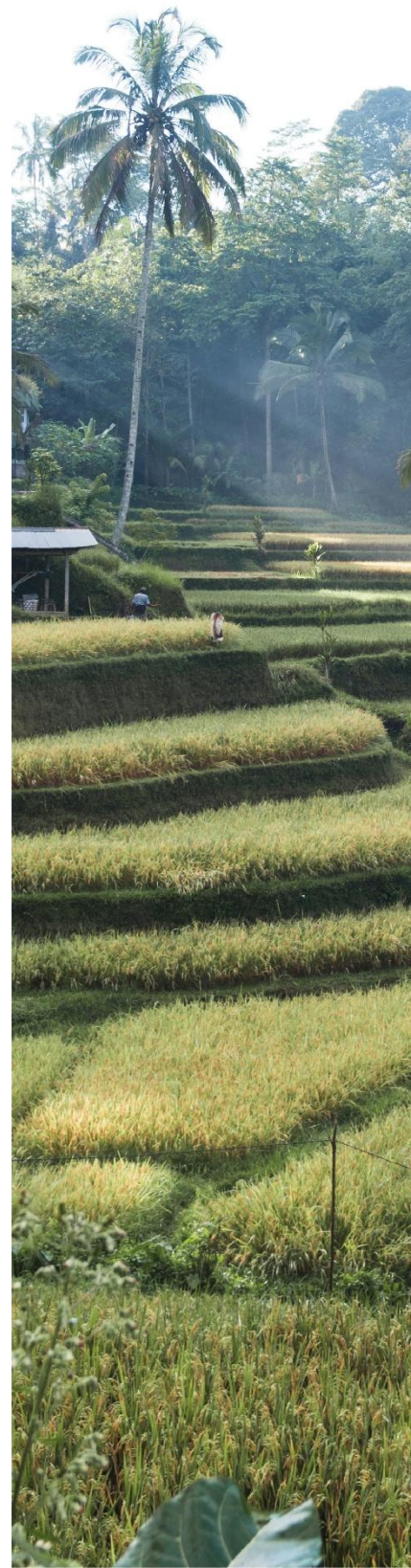
Pemutakhiran metodologi pengukuran FSVA mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), *Global Food Security Index* (GFSI) yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU), dan pengukuran ketahanan pangan yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO).

3. Memperkuat perencanaan multisektoral berbasis bukti

Dengan metodologi yang diperbarui, FSVA menjadi landasan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan terpadu di berbagai bidang utama, termasuk perbaikan gizi, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kesehatan, pertanian, serta pedesaan. FSVA dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan. FSVA juga dapat menjadi sarana untuk membangun kolaborasi dan sinergi antarbidang dan antarpihak dari unsur *Academic, Business, Community, Government, dan Media* (ABCGM) yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan Indonesia Emas 2045.

4. Mempertimbangkan ketersediaan data dan dilaksanakan melalui proses inklusif

Dalam menetapkan metodologi yang dimutakhirkan, di samping menggunakan rujukan dan standar nasional maupun internasional, prosesnya juga dilakukan secara inklusif melibatkan berbagai instansi sumber data, pengelola FSVA di pusat dan daerah, pengguna, serta para pakar yang kompeten di bidangnya melalui beberapa kali diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*) untuk menjamin agar





penerapan metode baru ini dapat dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam penyusunan kebijakan dan program maupun evaluasinya.

Pemutakhiran indikator meliputi:

1. Aspek ketersediaan pangan

- Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan sumber karbohidrat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan wilayah. Pemilihan pangan sumber karbohidrat didasari oleh pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari kebutuhan total kalori berasal dari sumber karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian). Penambahan komoditas pisang karena terdapat wilayah di Indonesia yang menjadikan pisang sebagai sumber karbohidrat (contoh Maluku Utara).
- Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan. Ketersediaan energi (yang biasanya diukur dalam kilokalori per orang per hari) dijadikan sebagai dasar dari ketahanan pangan karena secara langsung mencerminkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan beraktivitas, yaitu memiliki kalori yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Indikator ini didekati dari data konsumsi energi yang mampu menggambarkan jumlah konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah. Data konsumsi energi telah memperhitungkan berbagai jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah, sehingga dapat melengkapi data produksi pada level kabupaten/kota yang terbatas jenis komoditasnya serta terbatas data pendukung lain seperti perubahan stok, impor, dan ekspor.
- Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan. Dalam rangka mendukung tercapainya generasi emas perlu diikuti peningkatan kualitas konsumsi pangan, terutama konsumsi protein hewani. Protein hewani memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya *stunting* karena mengandung asam amino esensial yang dapat menyintesis hormon pertumbuhan. Selain mencegah terjadinya *stunting* pada anak, protein hewani juga berperan penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh dan menjaga kesehatan tubuh. Protein hewani asal ternak memiliki komposisi asam amino lengkap yang diperlukan tubuh. Protein hewani cenderung lebih bermanfaat untuk massa otot daripada protein nabati, terutama pada orang dewasa. Mengingat pentingnya protein hewani asal ternak bagi manusia di segala lapis usia, maka konsumsi produk ternak tersebut semestinya dipacu menuju tingkat konsumsi ideal yang sehat, cerdas, aktif, produktif dan secara berkelanjutan. Penghitungan ketersediaan protein hewani didekati dari data konsumsi protein hewani.

”Ketiga indikator tersebut sekaligus telah merepresentasikan keberagaman dan kualitas pangan yang berbahan asal dari tumbuhan dan hewan.”

- Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan peraturan perundangan. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tidak hanya berperan sebagai solusi strategis untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menyerap hasil produksi pada sektor hulu dan memastikan produksi pertanian tetap berjalan optimal. Pada sektor hilir, CPP dapat menjadi bagian upaya untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), mengendalikan harga komoditas pangan di pasar, dan membantu menanggulangi kebencanaan. Selain itu, pengembangan cadangan pangan diperlukan untuk mengantisipasi: (a) kondisi iklim di Indonesia yang tidak menentu, sehingga rentan atas bencana banjir dan kekeringan, (b) masa panen yang tidak merata antarwaktu dan antardaerah, dan (c) banyaknya kejadian darurat memerlukan cadangan pangan untuk penanganan pascabencana, penanganan kerawanan pangan, dan bantuan pangan wilayah.

“Keberadaan dan besaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mencerminkan tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kerentanan pangan transien dampak dari perubahan iklim dan guncangan sosial ekonomi yang datang mendadak.”

2. Aspek keterjangkauan pangan

- Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan berkontribusi positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga atau perseorangan, maka semakin tinggi pula dalam pencapaian ketahanan pangannya. Jumlah rumah tangga miskin merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kerawanan pangan.
- Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng). Kenaikan harga pangan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Rumah tangga tersebut tidak mampu mengakses pangan yang cukup, beragam, dan aman ketika harga pangan naik secara signifikan, sehingga tingkat ketahanan pangannya pun rendah. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, akses mereka terhadap pangan berkurang karena daya beli menurun. Terdapat 4 (empat) jenis komoditas pangan yang dianalisis dinamika harganya, yaitu beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng kemasan. Berdasarkan analisis keterkaitan harga dengan tingkat ketahanan pangan, keempat komoditas tersebut dapat mewakili keseluruhan kelompok komoditas pangan penting dari pola konsumsi pangan yang dibutuhkan untuk dapat hidup secara sehat dan aktif dengan memenuhi kebutuhan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral).
- *Prevalence of Undernourishment* (PoU). PoU adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi/*Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. FAO menjadikan PoU sebagai salah satu indikator pada aspek keterjangkauan pangan yang mempengaruhi situasi ketahanan pangan.

3. Aspek pemanfaatan pangan

- Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi anak, dan menjadi hal yang sangat penting dalam aspek pemanfaatan pangan. Perempuan berperan dalam memilih, mengolah, menyajikan, dan menyimpan pangan untuk keluarga. Oleh karena itu, tingkat pendidikan perempuan dapat mempengaruhi kecukupan konsumsi pangan keluarga.
- Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Air, sanitasi, dan kebersihan merupakan faktor penting dari hidup sehat. Akses yang terbatas terhadap fasilitas air bersih yang aman dan lebih baik dikaitkan dengan beberapa kondisi kesehatan dan gizi termasuk *stunting* melalui beberapa mekanisme seperti diare berulang, infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah, dan disfungsi enterik lingkungan.
- Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel. Memastikan keamanan pangan merupakan bagian penting dari aspek pemanfaatan pangan dan kesehatan masyarakat. Sistem pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang efektif merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Selain itu penerapan standar keamanan dan mutu pangan dapat meningkatkan daya saing produk pangan dan akses perdagangan yang adil di pasar domestik maupun internasional.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Skor PPH konsumsi adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Skor PPH konsumsi mencerminkan kualitas zat gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Semakin tinggi skor PPH konsumsi, maka ketahanan pangan suatu wilayah semakin baik.
- Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada aspek pemanfaatan pangan. *Stunting* berkaitan erat dengan kerawanan pangan di suatu wilayah atau kerawanan pangan dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap makanan bergizi bagi keluarga termasuk anak balita. Kekurangan gizi pada anak balita dapat menghambat perkembangan fisik yang merupakan penyebab utama *stunting*.

Metode perhitungan yang digunakan untuk analisis komposit juga terus disempurnakan. FSVA 2005 dan FSVA 2009 menggunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*), sementara FSVA 2015 menggunakan metode analisis gerombol (*clustering*) dan analisis diskriminan. Sejak 2018 hingga 2025 penyusunan FSVA menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* yang mengacu pada ukuran internasional seperti *Global Hunger Index* (GHI) dan *Global Food Security Index* (GFSI). Perbedaanannya adalah FSVA 2025 tidak membedakan wilayah kabupaten dan kota, sehingga besaran bobot untuk kabupaten dan kota sama.

Hasil penyusunan FSVA menggunakan metode lama tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan FSVA yang menggunakan metode termutakhirkan. Dampak perubahan metodologi berimplikasi terhadap perubahan status ketahanan pangan pada beberapa wilayah:

1. beberapa daerah yang semula situasinya agak tahan/tahan/sangat tahan pangan dapat mengalami penurunan status apabila capaian indikator baru kinerjanya tidak optimal;
2. beberapa daerah yang semula situasinya agak rentan/rentan/sangat rentan pangan dapat mengalami peningkatan status apabila capaian indikator baru kinerjanya optimal; dan
3. daerah yang semula situasinya agak rentan/rentan/sangat rentan pangan dapat memburuk statusnya apabila capaian indikator baru kinerjanya tidak optimal.



BAB 3

METODOLOGI FSVA

3.1. Indikator dan Sumber Data FSVA

FSVA Nasional 2025 menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota dan disusun menggunakan data tahun 2024 untuk mencerminkan status ketahanan pangan di daerah kabupaten/kota. Penyusunan dilakukan menggunakan 12 indikator yang mewakili 3 (tiga) kelompok/aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Tabel 1). Seluruh indikator yang digunakan dalam analisis dibobot berdasarkan *expert judgement* untuk menghasilkan angka komposit.

Tabel 1. Indikator dan Sumber Data FSVA 2025

NO.	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
A. Ketersediaan Pangan			
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan pisang). Konsumsi normatif komoditas tersebut sebesar 300 gram/kapita/hari.	• Produksi Pangan 2023 dan 2024, Kementerian Pertanian. • KSA 2024, Badan Pusat Statistik.
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	Perbandingan antara konsumsi energi dengan standar kebutuhan energi (2.100 kkal/kapita/hari).	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik.
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	Perbandingan antara konsumsi protein hewani dengan standar kebutuhan protein hewani (25 gram/kapita/hari).	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik.
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Perbandingan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025.	Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional 2024, Badan Pangan Nasional.
B. Keterjangkauan Pangan			
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk total.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik.
6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	Persentase perbandingan standar deviasi dari harga komoditas pangan (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) terhadap rata-rata harga komoditas tersebut.	Panel Harga Pangan 2024, Badan Pangan Nasional.

NO.	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	Proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi/ <i>Minimum Dietary Energy Requirement</i> (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik.
C. Pemanfaatan Pangan			
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun.	Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah sampai pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) oleh perempuan berumur 15 tahun ke atas.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik.
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 (sepuluh) meter.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik.
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	Rata-rata persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan siap saji yang memenuhi standar keamanan pangan terhadap total sampel.	- E-monev Higiene Sanitasi Pangan 2024, Kementerian Kesehatan. - Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 2024, Badan Pangan Nasional.
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama.	Pola Pangan Harapan 2024, Badan Pangan Nasional.
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	Anak di bawah 5 (lima) tahun yang tinggi badannya <-2 (kurang dari negatif dua) SD dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin.	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Kementerian Kesehatan.

3.2. Analisis

Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan 11 indikator dilakukan dengan mengikuti sebaran empiris, sedangkan 1 (satu) indikator, yaitu prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) dilakukan dengan mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Cut off Point Indikator Individu

NO.	INDIKATOR	RANGE	NO.	INDIKATOR	RANGE
A. Ketersediaan Pangan			B. Keterjangkauan Pangan		
1	Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan.	$\geq 1,50$	5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan	≥ 30
		$1,25 - <1,50$			$25 - <30$
		$1,00 - <1,25$			$20 - <25$
		$0,75 - <1,00$			$15 - <20$
		$0,50 - <0,75$			$10 - <15$
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	$<0,50$	6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	<10
		<70			≥ 10
		$70 - <80$			$9 - <10$
		$80 - <90$			$8 - <9$
		$90 - <100$			$7 - <8$
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	$100 - <110$	7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	$6 - <7$
		≥ 110			<6
		<70			≥ 25
		$70 - <80$			$20 - <25$
		$80 - <90$			$15 - <20$
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	$90 - <100$			$10 - <15$
		$100 - <110$			$5 - <10$
		≥ 110			<5
		<5			
		$5 - <10$			



NO.	INDIKATOR	RANGE	NO.	INDIKATOR	RANGE
C. Pemanfaatan Pangan					
8.	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	<6,0	11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	<70
		6,0 - <6,5			70 - <75
		6,5 - <7,5			75 - <80
		7,5 - <8,5			80 - <85
		8,5 - <9,0			85 - <90
9	Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.	≥9,0	12	Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	≥90
		≥ 70			≥40
		60 - <70			30 - <40
		50 - <60			20 - <30
		40 - <50			<20
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap jumlah sampel.	30 - <40			
		40 - <50			
		50 - <60			
		60 - <70			
		≥70			

Analisis Komposit

Pendekatan yang diadopsi untuk analisis komposit dilakukan menggunakan metode pembobotan, yaitu dengan menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Pembobotan yang dilakukan mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI). Goodridge (2007) menyatakan bahwa apabila variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuan. Indeks komposit tersebut selanjutnya disebut Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. penyesuaian data dalam rentang minimum dan maksimum yang telah ditentukan;
2. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale cut off point* indikator individu;
3. perhitungan *cut off* komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing *cut off* indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

$$K(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i c_{ij} \dots\dots\dots(1)$$

- K(j) : *Cut off* komposit kabupaten/kota ke-j
 a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i
 c_{ij} : Nilai hasil normalisasi *cut off* masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j
 i : Indikator ke 1, 2, ..., 12
 j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ..., 514

Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Besaran bobot masing-masing indikator didasarkan pada penilaian para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Bobot Indikator dalam Setiap Aspek Ketahanan Pangan

NO.	INDIKATOR	BOBOT
A. Ketersediaan Pangan		33,5
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	9,5
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	8,0
B. Keterjangkauan Pangan		33,0
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	11,8
6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	11,3
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	9,9
C. Pemanfaatan Pangan		33,5
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun.	5,0
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	7,5
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	6,0
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	7,8
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	7,2

4. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale* data indikator individu;
5. perhitungan skor komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i x_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Y(j) : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

x_{ij} : Nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

i : Indikator ke 1, 2, ..., 12

j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ..., 514

Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing berdasarkan pada bobot masing-masing indikator; dan

6. perhitungan indeks komposit dengan mengubah skor komposit ke dalam skala 0-100.

Indeks komposit terbagi menjadi 6 (enam) kelompok/prioritas. Kabupaten/kota yang berada dalam prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), dan agak rentan (prioritas 3), sedangkan kabupaten/kota yang berada dalam prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5), dan sangat tahan (prioritas 6) sesuai Tabel 4. Tujuan dari penentuan prioritas adalah untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan.

Tabel 4. Bobot Indikator dalam Setiap Aspek Ketahanan Pangan

PRIORITAS	CUT OFF	KETERANGAN
1	<45,59	Sangat rentan
2	45,60 – 53,42	Rentan
3	53,43 – 61,47	Agak rentan
4	61,48 – 69,52	Agak tahan
5	69,53 – 77,35	Tahan
6	>77,35	Sangat tahan





BAB 4

SITUASI KETAHANAN PANGAN INDONESIA

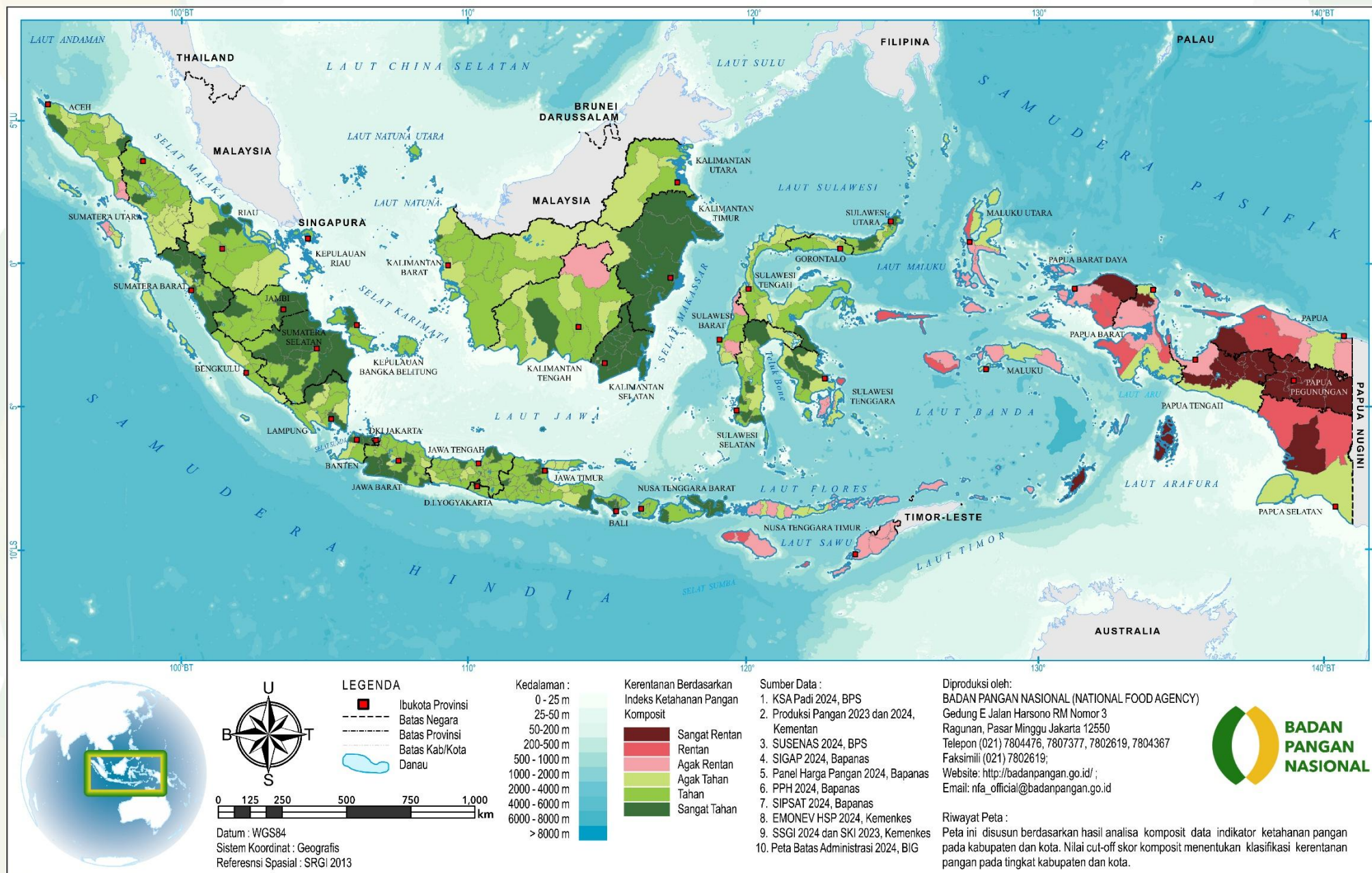
4.1. Situasi Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2025

Berdasarkan pemutakhiran metodologi baru, situasi ketahanan pangan tahun 2025 di Indonesia menunjukkan jumlah wilayah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 433 kabupaten/kota (84,24 persen), sedangkan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 81 kabupaten/kota (15,76 persen). Sebaran jumlah kabupaten/kota untuk masing-masing prioritas disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025

PRIORITAS	FSVA 2025
1	20
2	19
3	42
4	111
5	216
6	106
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	81
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	433





Gambar 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025

Wilayah rentan pangan sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan seperti ditunjukkan pada Tabel 6. Pulau Papua merupakan wilayah dengan sebaran daerah rentan rawan pangan terbanyak, yaitu sejumlah 36 kabupaten/kota. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan seluruh kabupaten/kota termasuk daerah rentan rawan pangan. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terbanyak, yaitu 18 kabupaten/kota.

Tabel 6. Sebaran Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025

NO.	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN/KOTA RENTAN RAWAN PANGAN			
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	TOTAL
1	Aceh	-	-	2	2
2	Sumatera Utara	-	-	2	2
3	Nusa Tenggara Timur	-	3	15	18
4	Kalimantan Tengah	-	-	1	1
5	Sulawesi Utara	-	-	1	1
6	Sulawesi Tenggara	-	1	3	4
7	Sulawesi Barat	-	-	2	2
8	Maluku	2	2	5	9
9	Maluku Utara	-	3	3	6
10	Papua Barat	1	2	2	5
11	Papua Barat Daya	1	2	2	5
12	Papua Selatan	1	2	-	3
13	Papua Pegunungan	8	-	-	8
14	Papua	1	4	3	8
15	Papua Tengah	6	-	1	7
TOTAL					81

Karakteristik kabupaten/kota rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, rasio CBPD yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan rendah, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah. Perbandingan nilai dari setiap indikator antara daerah rentan dan daerah tahan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Nilai Rata-rata Kelompok Rentan dan Tahan Pangan

NO.	INDIKATOR	DAERAH RENTAN (P1-3)	DAERAH TAHAN (P4-6)
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	6,24	2,80
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	86,76	97,68

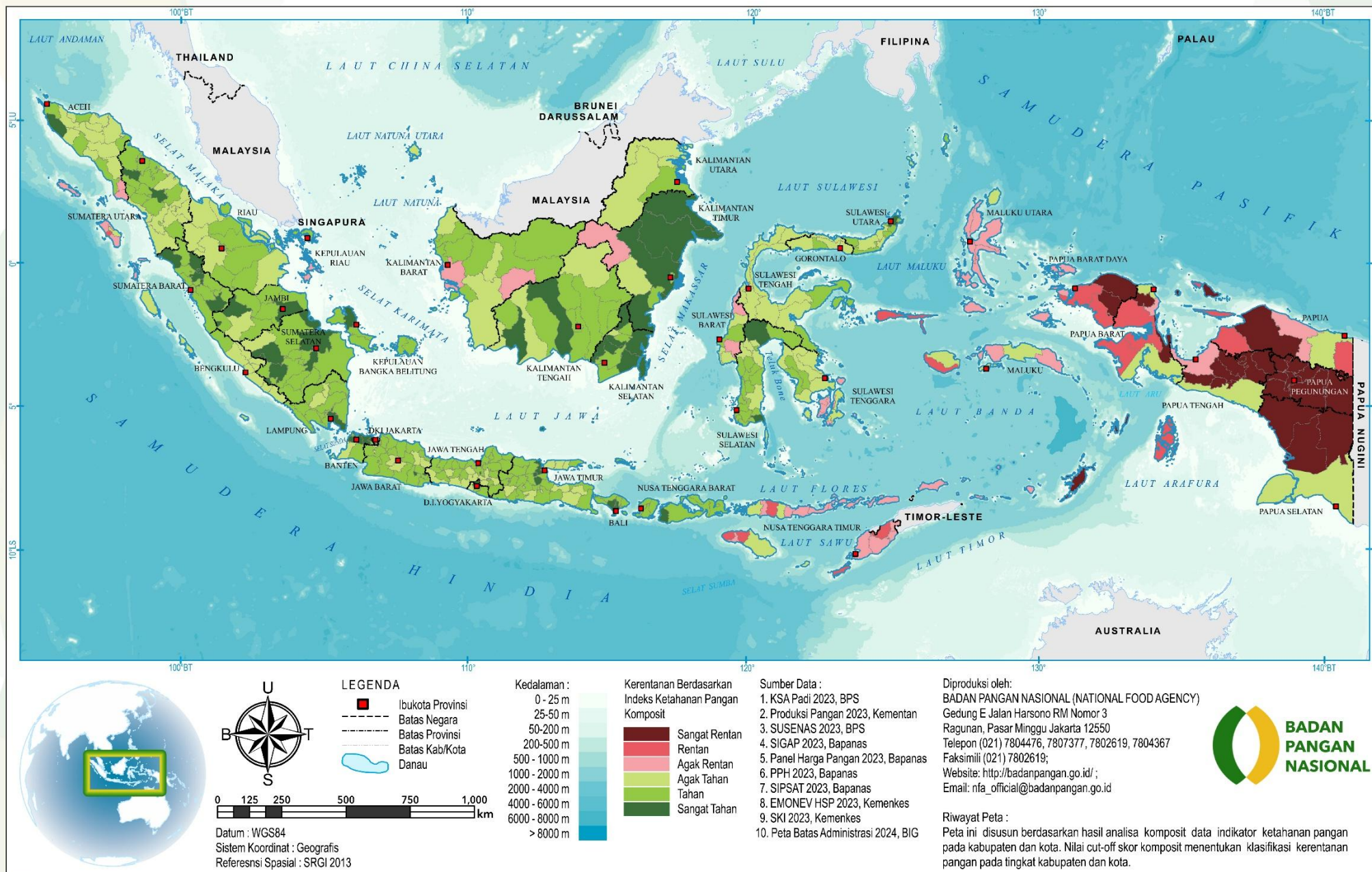
NO.	INDIKATOR	DAERAH RENTAN (P1-3)	DAERAH TAHAN (P4-6)
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	68,91	93,11
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	5,24	44,25
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	22,26	9,09
6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	6,62	5,63
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	23,99	8,66
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun.	7,97	9,14
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	50,30	23,28
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	23,47	61,01
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	71,46	87,70
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	32,95	21,08

4.2. Situasi Ketahanan Pangan 2024 dengan Proyeksi Mundur (*Backcasting*)

Berdasarkan metodologi perhitungan baru, situasi ketahanan pangan tahun 2024 di Indonesia menunjukkan jumlah wilayah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 422 kabupaten/kota (82,10 persen), sedangkan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 92 kabupaten/kota (17,90 persen). Situasi ini disajikan dalam Tabel 8 dan Gambar 2.

Tabel 8. Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*Backcasting*)

PRIORITAS	FSVA 2024
1	25
2	19
3	48
4	143
5	224
6	55
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	92
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	422



Gambar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 (Backcasting)

Wilayah rentan pangan sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan) dan wilayah kepulauan. Pulau Papua merupakan wilayah dengan sebaran daerah rentan rawan pangan terbanyak, yaitu sebanyak 36 kabupaten/kota. Meskipun jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan tidak mengalami perubahan, namun terjadi perbaikan di Provinsi Papua Barat Daya dan terjadi penurunan di Provinsi Papua; masing-masing 1 (satu) kabupaten.

Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan seluruh kabupaten/kota termasuk daerah rentan rawan pangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 18 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami perubahan di tahun 2025. Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 masih memiliki kabupaten/kota rentan rawan pangan, pada tahun 2025 tidak terdapat kabupaten/kota rentan rawan pangan. Sebaran kabupaten/kota rentan rawan pangan dalam kondisi *backcasting* disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Sebaran Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2024 (*Backcasting*)

NO.	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN/KOTA RENTAN RAWAN PANGAN			
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	TOTAL
1	Aceh	-	-	3	3
2	Sumatera Utara	-	1	3	4
3	Kep. Riau	-	-	1	1
4	Nusa Tenggara Timur	-	5	13	18
5	Kalimantan Barat	-	-	2	2
6	Kalimantan Timur	-	-	1	1
7	Sulawesi Utara	-	-	1	1
8	Sulawesi Tengah	-	-	1	1
9	Sulawesi Tenggara	-	-	6	6
10	Sulawesi Barat	-	-	2	2
11	Maluku	2	3	4	9
12	Maluku Utara	-	2	6	8
13	Papua Barat	2	2	1	5
14	Papua Barat Daya	2	2	2	6
15	Papua Selatan	3	-	-	3
16	Papua Pegunungan	8	-	-	8
17	Papua	2	4	1	7
18	Papua Tengah	6	-	1	7
TOTAL					92

4.3. Perbandingan Situasi Ketahanan Pangan 2024 (*Backcasting*) dan 2025

Berdasarkan hasil pemutakhiran metodologi, secara umum kondisi ketahanan pangan tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Daerah rentan rawan pangan menurun dari 92 kabupaten/kota (17,90 persen) menjadi 81 kabupaten/kota (15,76 persen). Daerah rentan rawan pangan

prioritas 1 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota dan daerah prioritas 3 sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota. Perubahan situasi ketahanan pangan disajikan dalam Tabel 10.

**Tabel 10. Perbandingan Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota
FSVA 2024 (*Backcasting*) dan Tahun 2025**

PRIORITAS	FSVA 2024	FSVA 2025
1	25	20
2	19	19
3	48	42
4	143	111
5	224	216
6	55	106
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	92	81
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	422	433

Kabupaten/kota yang mengalami penurunan status dari tahan (prioritas 4-6) menjadi rentan (prioritas 1-3) sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota. Provinsi yang mengalami penurunan status ketahanan pangan terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua masing-masing sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana disajikan dalam Tabel 11. Sementara itu, terlihat terjadinya perbaikan atau peningkatan jumlah kabupaten/kota pada status tingkat sangat tahan pangan (prioritas 6) hampir 2 (dua) kali lipat, yaitu dari 55 kabupaten/kota di 2024 menjadi 106 kabupaten/kota di 2025.

Tabel 11. Kabupaten/Kota yang Mengalami Perubahan Status Tahan Menjadi Rentan

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	4	3
2	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	4	3
3	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	4	2
4	Kalimantan Tengah	Murung Raya	4	3
5	Maluku	Buru	4	3
6	Papua	Kota Jayapura	4	3

Situasi ketahanan pangan Indonesia secara umum mengalami peningkatan, namun kondisi di daerah rentan rawan pangan masih perlu mendapat fokus penanganan dari lintas sektor. Di kabupaten/kota rentan rawan pangan menunjukkan perbaikan hanya 4 (empat) indikator, yaitu rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), koefisien varian harga, *Prevalence of Undernourishment* (PoU), dan rata-rata lama sekolah perempuan umur lebih dari 15 tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kondisi/kinerja 8 (delapan) indikator lain. Perbandingan nilai masing-masing indikator antara tahun 2024 (*backcasting*) dan 2025 pada Tabel 12.

Tabel 12. Kabupaten/Kota yang Mengalami Perubahan Status Tahan Menjadi Rentan

NO.	INDIKATOR	DAERAH RENTAN		DAERAH TAHAN	
		2024 (backcasting)	2025	2024 (backcasting)	2025
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	5,87	6,24	2,69	2,80
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	89,94	86,76	99,6	97,68
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	71,15	68,91	91,54	93,11
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	0,66	5,24	30,90	44,25
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	21,16	22,26	9,39	9,09
6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	6,78	6,62	6,57	5,63
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	26,03	23,99	9,01	8,66
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun.	7,95	7,97	9,04	9,14
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	47,30	50,30	24,64	23,28
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	25,43	23,47	62,86	61,01
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	73,39	71,46	87,87	87,70
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	32,90	32,95	21,38	21,08

4.4. Situasi Ketahanan Pangan Tahun 2024 Metode Lama dan Tahun 2025

FSVA 2024 dengan metode lama dan FSVA 2025 dengan metode termutakhir tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Namun demikian, untuk kepentingan analisis berikut ini disajikan beberapa hal pokok perbandingan kedua FSVA tersebut. Berdasarkan metode lama yang menggunakan 9 (sembilan) indikator, situasi ketahanan pangan Indonesia tahun 2024 menunjukkan daerah rentan pangan berjumlah 62 kabupaten/kota (12,06 persen), sedangkan tahun 2025 berdasarkan hasil pemutakhiran metodologi terdapat 81 kabupaten/kota (15,76 persen) masuk dalam kategori daerah rentan pangan (Tabel 13). Indikator-indikator dalam metodologi termutakhir mampu memotret situasi ketahanan pangan dengan lebih komprehensif berdasarkan aspek-aspek ketahanan pangan.

Tabel 13. Sebaran Prioritas FSVA 2024 Metode Lama vs FSVA 2025

PRIORITAS	FSVA 2024 (metode lama)	FSVA 2025 (metode termutakhir)
1	21	20
2	18	19
3	23	42
4	41	111
5	76	216
6	335	106
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	62	81
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	452	433

Berdasarkan Tabel 13, perubahan metodologi dari 9 (sembilan) indikator menjadi 12 indikator menyebabkan perubahan situasi ketahanan pangan yang signifikan di 33 kabupaten/kota, di mana Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan paling banyak perubahan situasi ketahanan pangan kabupaten/kota (Tabel 14). Perubahan situasi ketahanan pangan di 33 kabupaten/kota tersebut karena perbaikan kinerja indikator lama tidak diikuti dengan kinerja yang optimal dari indikator baru, terutama rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Tabel 14. Perubahan Situasi Tahan Pangan Pada FSVA 2024 Metode Lama Menjadi Situasi Rentan Pangan Pada FSVA 2025

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Sumatera Utara	Nias Utara	5	3
2	Sumatera Utara	Nias Barat	4	3
3	Nusa Tenggara Timur	Kupang	5	3
4	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	4	3
5	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	5	3
6	Nusa Tenggara Timur	Belu	5	3

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2024	TAHUN 2025
7	Nusa Tenggara Timur	Alor	4	3
8	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	5	3
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	5	3
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	5	3
11	Nusa Tenggara Timur	Lembata	5	3
12	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	5	3
13	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	6	3
14	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	5	3
15	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	4	2
16	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	4	2
17	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	4	3
18	Nusa Tenggara Timur	Malaka	5	3
19	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	6	3
20	Sulawesi Tenggara	Muna	5	3
21	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	6	3
22	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	4	3
23	Sulawesi Barat	Mamasa	5	3
24	Maluku	Buru	6	3
25	Maluku	Seram Bagian Timur	5	3
26	Maluku	Seram Bagian Barat	4	3
27	Maluku	Maluku Barat Daya	4	3
28	Maluku	Kota Tual	4	2
29	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	5	3
30	Papua	Sarmi	4	3
31	Papua	Kota Jayapura	6	3
32	Papua Barat	Manokwari Selatan	5	3
33	Papua Tengah	Nabire	4	3





BAB 5

INDEKS KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selain itu, dihasilkan pula IKP Nasional yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan nasional.

IKP Nasional disusun mulai tahun 2025 dan menjadi indikator kinerja di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Prioritas Nasional-2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru) yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan perhitungan, capaian IKP Nasional Tahun 2025 sebesar 73,00 dengan rincian untuk aspek ketersediaan pangan memiliki skor sebesar 61,47; aspek keterjangkauan pangan memiliki skor sebesar 82,70; dan aspek pemanfaatan pangan memiliki skor sebesar 74,99.

Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, 5 (lima) provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Kalimantan Selatan dengan skor sebesar 81,98; Kalimantan Timur dengan skor sebesar 80,87; Bali dengan skor sebesar 79,89; Sumatera Selatan dengan skor sebesar 79,31; dan Kepulauan Bangka Belitung dengan skor sebesar 78,20. Sedangkan 5 (lima) provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua Pegunungan dengan skor sebesar 31,96; Papua Tengah dengan skor sebesar 41,61; Papua Selatan dengan skor sebesar 53,96; Papua Barat Daya dengan skor sebesar 57,15; dan Maluku dengan skor sebesar 57,18.

Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten/Kota, 5 (lima) kabupaten/kota dengan urutan skor paling tinggi adalah Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan skor sebesar 88,79; Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat dengan skor sebesar 86,74; Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor sebesar 86,50; Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan skor sebesar 86,42; dan Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat dengan skor sebesar 85,92. Sedangkan 5 (lima) kabupaten dengan urutan skor paling rendah adalah Kabupaten Nduga di Provinsi Papua Pegunungan dengan skor sebesar 19,93; Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah dengan skor sebesar 23,75; Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan dengan skor sebesar 26,40; Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah dengan skor sebesar 27,27 dan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah dengan skor sebesar 27,34.



BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sebagai preskripsi untuk membangun wilayah rentan menjadi tahan pangan, direkomendasikan implementasi program dan kegiatan terhadap peningkatan ketahanan pangan bagi:

1. kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua dengan jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak;
2. kabupaten/kota di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan; dan
3. kabupaten/kota yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, tidak memiliki atau memiliki CBPD rendah, ketersediaan protein hewani rendah, PoU tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

1. **Aspek ketersediaan** dengan permasalahan utama adalah terbatasnya jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk; rendahnya ketersediaan protein hewani dan CBPD direkomendasikan program dan kegiatan:
 - a. peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang sesuai dengan potensi lahan dan biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan;
 - b. peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan CPPD (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada kabupaten/kota di wilayah kepulauan yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan;
 - c. pemanfaatan pekarangan, kebun, lahan tidur, lahan marginal, dan talun dalam rangka mendukung cadangan pangan "hidup" berbasis sumberdaya pangan lokal;
 - d. peningkatan ketersediaan sumber pangan hewani dengan pengembangan peternakan skala kecil terutama untuk unggas dan ternak kecil;
 - e. pengelolaan keluar masuk barang (distribusi dan perdagangan) untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk;
 - f. penanganan susut dan sisa pangan di sepanjang rantai pasok pangan, dengan menggunakan teknologi inovatif mulai dari kegiatan panen di tingkat usaha tani, distribusi dan pergudangan, dan perdagangan sampai tingkat retail (penanganan susut pangan), redistribusi dan pengolahan pangan dari retail yang mendekati kadaluarsa serta perubahan perilaku ibu rumah tangga mulai dari pembelian, penyimpanan, pengolahan, sampai pada penyajiannya untuk keluarga (penanganan sisa pangan); dan
 - g. kajian, diseminasi dan penerapan pertanian modern seperti *smart farming* dan pemanfaatan teknologi digital dan bioteknologi untuk peningkatan ketersediaan pangan.

2. **Aspek keterjangkauan** dengan permasalahan utama adalah PoU yang tinggi; terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan; dan harga pangan yang berfluktuasi direkomendasikan program dan kegiatan:
- a. pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antarwaktu antarwilayah; termasuk daerah rentan rawan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen;
 - b. perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau;
 - d. pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional secara terencana dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan peningkatan ekonomi melalui ekspor pangan;
 - e. fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan pangan antarwilayah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit pangan;
 - f. peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif;
 - g. fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama di bidang pangan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
 - h. penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan dirancang untuk memenuhi gizi masyarakat dan dengan memanfaatkan potensi bahan pangan lokal; dan
 - i. pembangunan infrastruktur dasar (pasar, jalur transportasi, pelabuhan) untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, termasuk input output pertanian dan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. **Aspek pemanfaatan** dengan permasalahan utama adalah keamanan pangan; pola konsumsi pangan yang belum beragam; prevalensi balita *stunting*; akses air bersih; serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan, direkomendasikan program dan kegiatan:
- a. penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui penyusunan regulasi dan standar terkait keamanan dan mutu pangan, serta pengawasan keamanan pangan sebelum produk beredar dan saat diedarkan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan, seperti di antaranya fasilitasi mobil laboratorium keliling, *rapid test kit* dan laboratorium pengujian yang merata di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. penyusunan regulasi dan standar terkait keamanan dan mutu pangan;
 - d. penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan pangan lokal;
 - e. pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal;
 - f. penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
 - g. peningkatan pemenuhan konsumsi pangan B2SA bagi seluruh masyarakat;

- h. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat untuk perlunya mengonsumsi Pangan B2SA melalui perubahan perilaku konsumsi pangan;
- i. penurunan prevalensi balita *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (1.000 (seribu) hari pertama kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga terutama pada kelompok berpendapatan rendah);
- j. peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan;
- k. peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan; dan
- l. pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan.

Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Pusat-Daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi dalam konsep *pentahelix* perlu diaktualisasikan dalam implementasi program dan kegiatan ketahanan pangan yang direkomendasi. Kerja sama antarbidang dan antarpihak dari unsur *Academic, Business, Community, Government*, dan *Media* (ABCGM) akan mampu mengoptimalkan dukungan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya alam, sumber dana dan sumber daya manusia dalam menangani kerawanan pangan dan mencapai target SDGs, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).

Oleh karena itu, diperlukan **komitmen dan konsistensi semua pihak** dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi dan program inovatif untuk menangani kerawanan pangan.



Lampiran 1. Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2025

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
ACEH							
1	Aceh Selatan	80,58	84,59	66,67	77,25	109	5
2	Aceh Tenggara	62,04	83,00	62,67	69,16	329	4
3	Aceh Timur	58,07	83,11	54,60	65,17	395	4
4	Aceh Tengah	72,34	83,83	67,80	74,61	187	5
5	Aceh Barat	72,52	75,09	74,04	73,88	205	5
6	Aceh Besar	61,95	84,33	74,52	73,55	214	5
7	Pidie	53,80	81,87	54,66	63,35	417	4
8	Aceh Utara	54,50	79,15	61,77	65,07	396	4
9	Simeulue	53,62	71,59	61,29	62,12	425	4
10	Aceh Singkil	36,50	72,52	60,47	56,42	460	3
11	Bireuen	73,72	84,69	70,36	76,22	137	5
12	Aceh Barat Daya	62,01	80,88	64,03	68,91	336	4
13	Gayo Lues	70,96	78,71	66,57	72,05	257	5
14	Aceh Jaya	91,23	87,87	64,28	81,09	43	6
15	Nagan Raya	73,40	77,99	71,74	74,36	195	5
16	Aceh Tamiang	79,15	81,75	73,76	78,20	89	6
17	Bener Meriah	69,14	81,25	59,41	69,88	307	5
18	Pidie Jaya	60,84	77,07	59,79	65,84	389	4
19	Kota Banda Aceh	59,67	83,08	85,64	76,10	147	5
20	Kota Sabang	36,70	82,60	75,02	64,68	403	4
21	Kota Lhokseumawe	51,50	80,98	73,08	68,46	352	4
22	Kota Langsa	49,68	84,35	73,51	69,11	331	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
23	Kota Subulussalam	28,60	82,19	53,46	54,61	472	3
SUMATERA UTARA							
24	Tapanuli Tengah	57,27	84,75	57,52	66,42	380	4
25	Tapanuli Utara	78,46	87,24	57,98	74,50	191	5
26	Tapanuli Selatan	59,34	86,25	61,34	68,89	338	4
27	Nias	54,70	83,55	53,42	63,79	410	4
28	Langkat	54,95	84,83	73,62	71,06	285	5
29	Karo	92,87	87,70	65,78	82,09	34	6
30	Deli Serdang	61,92	88,03	80,95	76,91	120	5
31	Simalungun	58,76	80,20	71,96	70,26	301	5
32	Asahan	62,21	80,47	69,46	70,66	295	5
33	Labuhanbatu	63,00	86,08	64,84	71,23	279	5
34	Dairi	60,20	90,54	63,33	71,26	277	5
35	Toba	71,08	90,36	70,73	77,33	107	5
36	Mandailing Natal	61,97	86,38	57,69	68,59	345	4
37	Nias Selatan	55,81	80,93	48,58	61,68	432	4
38	Pakpak Bharat	60,56	89,76	61,06	70,36	299	5
39	Humbang Hasundutan	77,44	87,58	72,22	79,04	69	6
40	Samosir	73,57	87,37	68,19	76,32	135	5
41	Serdang Bedagai	59,55	87,71	70,02	72,35	244	5
42	Batu Bara	53,66	84,25	70,24	69,31	326	4
43	Padang Lawas Utara	59,66	87,34	60,26	68,99	334	4
44	Padang Lawas	56,15	88,16	62,67	68,90	337	4
45	Labuhanbatu Selatan	37,79	88,19	75,27	66,98	371	4
46	Labuhanbatu Utara	66,03	84,62	79,67	76,73	126	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
47	Nias Utara	52,96	77,38	53,02	61,04	436	3
48	Nias Barat	48,65	76,34	39,18	54,61	471	3
49	Kota Medan	40,84	78,20	90,63	69,85	309	5
50	Kota Pematangsiantar	55,01	87,87	74,13	72,26	247	5
51	Kota Sibolga	36,83	86,39	76,81	66,58	377	4
52	Kota Tanjung Balai	40,37	81,28	78,88	66,77	374	4
53	Kota Binjai	50,03	87,20	82,73	73,25	221	5
54	Kota Tebing Tinggi	58,88	86,44	83,45	76,21	138	5
55	Kota Padangsidimpuan	69,77	88,77	67,51	75,28	168	5
56	Kota Gunungsitoli	48,31	80,36	62,65	63,69	412	4
SUMATERA BARAT							
57	Pesisir Selatan	71,28	87,46	78,98	79,20	64	6
58	Solok	60,19	84,91	73,19	72,70	240	5
59	Sijunjung	68,48	87,85	71,89	76,02	152	5
60	Tanah Datar	69,51	88,92	76,08	78,12	92	6
61	Padang Pariaman	51,64	84,99	71,02	69,14	330	4
62	Agam	59,84	80,68	74,40	71,60	266	5
63	Lima Puluh Kota	87,51	87,20	72,45	82,37	27	6
64	Pasaman	81,39	86,52	71,16	79,65	56	6
65	Kepulauan Mentawai	65,78	79,67	56,83	67,36	365	4
66	Dharmasraya	69,22	87,76	79,15	78,67	80	6
67	Solok Selatan	71,59	85,06	80,18	78,91	72	6
68	Pasaman Barat	79,16	82,24	74,67	78,67	79	6
69	Kota Padang	74,02	89,70	84,09	82,57	26	6
70	Kota Solok	81,18	89,23	87,40	85,92	5	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
71	Kota Sawahlunto	62,69	89,22	84,66	78,81	75	6
72	Kota Padang Panjang	77,56	83,18	83,68	81,46	40	6
73	Kota Bukittinggi	51,85	84,81	85,82	74,10	203	5
74	Kota Payakumbuh	84,28	89,21	86,76	86,74	2	6
75	Kota Pariaman	63,62	87,26	84,46	78,40	86	6
RIAU							
76	Kampar	63,54	84,18	69,17	72,24	248	5
77	Indragiri Hulu	38,31	85,51	77,31	66,95	372	4
78	Bengkalis	73,77	86,84	78,99	79,83	53	6
79	Indragiri Hilir	56,46	83,85	57,37	65,81	390	4
80	Pelalawan	59,41	85,68	77,96	74,29	198	5
81	Rokan Hulu	38,56	83,88	76,42	66,20	385	4
82	Rokan Hilir	53,04	87,61	61,07	67,14	367	4
83	Siak	60,96	83,22	82,16	75,41	164	5
84	Kuantan Singingi	56,57	87,17	74,98	72,84	236	5
85	Kepulauan Meranti	59,91	75,04	50,97	61,91	428	4
86	Kota Pekanbaru	48,16	86,36	75,05	69,77	312	5
87	Kota Dumai	52,57	85,64	72,55	70,17	304	5
JAMBI							
88	Kerinci	63,96	76,41	69,42	69,90	306	5
89	Merangin	73,99	85,64	64,62	74,69	185	5
90	Sarolangun	69,06	87,13	69,36	75,12	173	5
91	Batanghari	70,14	85,64	75,23	76,96	117	5
92	Muaro Jambi	77,07	89,58	71,40	79,30	62	6
93	Tanjung Jabung Barat	78,45	79,42	67,30	75,04	176	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
94	Tanjung Jabung Timur	84,90	80,57	70,70	78,71	77	6
95	Bungo	78,11	85,86	71,69	78,52	84	6
96	Tebo	65,28	84,22	66,96	72,09	253	5
97	Kota Jambi	58,00	82,84	90,05	76,94	119	5
98	Kota Sungai Penuh	81,26	80,78	87,50	83,19	22	6
SUMATERA SELATAN							
99	Ogan Komering Ulu	72,38	80,57	66,88	73,24	223	5
100	Ogan Komering Ilir	86,75	76,83	77,51	80,38	47	6
101	Muara Enim	83,55	85,74	79,10	82,78	24	6
102	Lahat	73,58	81,72	73,27	76,16	142	5
103	Musi Rawas	88,93	84,29	73,79	82,33	28	6
104	Musi Banyuasin	81,96	81,91	72,43	78,75	76	6
105	Banyuasin	96,60	82,03	73,19	83,95	14	6
106	Ogan Komering Ulu Timur	81,64	80,92	82,71	81,76	38	6
107	Ogan Komering Ulu Selatan	74,63	80,28	73,72	76,19	139	5
108	Ogan Ilir	63,93	81,11	74,88	73,27	220	5
109	Empat Lawang	81,32	79,63	55,40	72,08	254	5
110	Penukal Abab Lematang Ilir	80,27	83,69	76,18	80,03	51	6
111	Musi Rawas Utara	71,90	78,97	67,99	72,92	233	5
112	Kota Palembang	65,21	85,38	91,16	80,56	45	6
113	Kota Pagar Alam	87,87	87,05	75,89	83,59	19	6
114	Kota Lubuk Linggau	73,38	85,07	79,41	79,26	63	6
115	Kota Prabumulih	55,48	84,70	80,69	73,57	213	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
BENGKULU							
116	Bengkulu Selatan	87,36	76,72	60,13	74,73	184	5
117	Rejang Lebong	77,32	78,70	58,14	71,35	275	5
118	Bengkulu Utara	53,65	85,01	62,42	66,94	373	4
119	Kaur	57,28	78,11	62,71	65,97	387	4
120	Seluma	76,51	79,63	59,91	71,98	259	5
121	Mukomuko	71,72	82,47	74,21	76,10	146	5
122	Lebong	79,63	82,12	62,75	74,80	181	5
123	Kepahiang	59,98	81,14	68,17	69,71	318	5
124	Bengkulu Tengah	74,44	83,96	60,31	72,85	235	5
125	Kota Bengkulu	33,14	80,81	77,68	63,79	409	4
LAMPUNG							
126	Lampung Selatan	79,52	82,86	84,33	82,23	30	6
127	Lampung Tengah	63,74	83,95	68,78	72,10	252	5
128	Lampung Utara	69,40	76,94	58,41	68,21	356	4
129	Lampung Barat	77,71	83,20	70,64	77,15	111	5
130	Tulang Bawang	67,32	84,31	68,92	73,46	217	5
131	Tanggamus	63,43	81,76	58,34	67,77	361	4
132	Lampung Timur	54,28	78,09	66,98	66,39	381	4
133	Way Kanan	80,70	79,18	76,57	78,82	74	6
134	Pesawaran	68,42	81,18	68,40	72,62	241	5
135	Pringsewu	76,66	81,69	69,91	76,06	148	5
136	Mesuji	79,20	88,94	70,13	79,38	60	6
137	Tulang Bawang Barat	57,28	85,84	62,13	68,33	353	4
138	Pesisir Barat	81,50	81,99	59,87	74,41	194	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
139	Kota Bandar Lampung	45,21	83,30	86,00	71,44	272	5
140	Kota Metro	77,91	84,85	88,26	83,67	18	6
KEP. BANGKA BELITUNG							
141	Bangka	84,14	86,51	81,12	83,91	15	6
142	Belitung	62,01	81,69	82,36	75,33	167	5
143	Bangka Selatan	71,02	87,79	68,58	75,74	156	5
144	Bangka Tengah	63,30	84,76	78,95	75,62	159	5
145	Bangka Barat	74,24	87,36	69,39	76,94	118	5
146	Belitung Timur	67,07	82,66	78,69	76,11	145	5
147	Kota Pangkal Pinang	62,81	87,42	87,11	79,07	68	6
KEP. RIAU							
148	Bintan	61,72	89,81	68,17	73,15	228	5
149	Karimun	40,90	81,50	67,89	63,34	418	4
150	Natuna	45,55	88,41	80,84	71,52	267	5
151	Lingga	50,12	79,56	74,58	68,03	359	4
152	Kepulauan Anambas	45,39	90,65	63,30	66,33	383	4
153	Kota Batam	49,99	87,06	86,78	74,55	189	5
154	Kota Tanjung Pinang	43,44	90,11	76,03	69,76	314	5
DKI JAKARTA							
155	Kep. Seribu	33,43	87,24	70,87	63,73	411	4
156	Kota Jakarta Pusat	39,10	90,37	83,05	70,74	292	5
157	Kota Jakarta Utara	42,88	82,56	79,04	68,09	358	4
158	Kota Jakarta Barat	37,13	89,85	87,06	71,25	278	5
159	Kota Jakarta Selatan	41,53	89,89	88,01	73,06	231	5
160	Kota Jakarta Timur	39,95	90,11	89,11	72,97	232	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
JAWA BARAT							
161	Bogor	73,84	85,85	69,54	76,36	133	5
162	Sukabumi	79,40	87,26	69,50	78,68	78	6
163	Cianjur	69,25	86,87	79,74	78,58	81	6
164	Bandung	73,40	82,62	74,00	76,64	127	5
165	Garut	78,72	83,87	74,77	79,10	66	6
166	Tasikmalaya	60,28	82,52	70,78	71,14	282	5
167	Ciamis	61,93	87,17	66,13	71,67	265	5
168	Kuningan	52,53	84,54	67,11	67,98	360	4
169	Cirebon	66,74	83,29	69,63	73,17	226	5
170	Majalengka	58,49	78,93	78,08	71,80	261	5
171	Sumedang	74,09	84,51	79,03	79,18	65	6
172	Indramayu	72,98	80,15	75,49	76,19	141	5
173	Subang	64,53	81,92	77,19	74,51	190	5
174	Purwakarta	63,67	83,08	76,70	74,44	192	5
175	Karawang	66,66	84,56	79,13	76,74	125	5
176	Bekasi	72,17	76,91	82,34	77,14	112	5
177	Bandung Barat	55,50	81,37	71,82	69,50	323	4
178	Pangandaran	72,60	85,59	77,65	78,58	82	6
179	Kota Bogor	27,40	83,22	77,72	62,68	423	4
180	Kota Sukabumi	70,41	86,87	79,57	78,91	73	6
181	Kota Bandung	54,57	84,72	84,14	74,43	193	5
182	Kota Cirebon	38,69	81,88	77,04	65,79	391	4
183	Kota Bekasi	43,96	86,33	89,12	73,07	230	5
184	Kota Depok	41,48	85,42	85,21	70,63	297	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
185	Kota Cimahi	55,41	84,39	84,19	74,62	186	5
186	Kota Tasikmalaya	78,88	84,07	71,43	78,10	93	6
187	Kota Banjar	89,54	82,70	79,82	84,03	13	6
JAWA TENGAH							
188	Cilacap	50,75	78,55	76,52	68,55	347	4
189	Banyumas	54,47	77,69	80,52	70,86	288	5
190	Purbalingga	72,64	77,21	75,74	75,19	170	5
191	Banjarnegara	59,02	77,06	77,85	71,28	276	5
192	Kebumen	60,22	77,65	78,41	72,06	256	5
193	Purworejo	50,31	79,66	80,90	70,24	302	5
194	Wonosobo	57,09	73,64	77,62	69,43	324	4
195	Magelang	63,47	81,62	75,25	73,41	218	5
196	Boyolali	52,95	82,74	76,51	70,67	294	5
197	Klaten	56,51	79,68	79,86	71,98	258	5
198	Sukoharjo	52,86	85,43	84,23	74,12	202	5
199	Wonogiri	69,34	78,68	80,09	76,02	151	5
200	Karanganyar	62,17	82,02	82,27	75,45	161	5
201	Sragen	57,53	83,01	85,67	75,36	165	5
202	Grobogan	65,04	80,76	80,54	75,42	163	5
203	Blora	63,22	77,38	80,84	73,79	209	5
204	Rembang	64,88	77,75	83,81	75,47	160	5
205	Pati	72,84	84,94	81,31	79,67	55	6
206	Kudus	59,59	85,84	76,15	73,80	208	5
207	Jepara	78,70	87,82	78,26	81,56	39	6
208	Demak	60,17	81,55	87,62	76,42	131	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
209	Semarang	54,44	86,43	82,08	74,26	200	5
210	Temanggung	46,94	81,72	77,04	68,50	351	4
211	Kendal	68,09	80,85	82,88	77,26	108	5
212	Batang	87,64	83,24	80,20	83,69	17	6
213	Pekalongan	61,12	84,47	79,53	74,99	177	5
214	Pemalang	61,97	80,59	70,88	71,10	284	5
215	Tegal	51,60	84,76	77,18	71,11	283	5
216	Brebes	69,14	78,97	77,38	75,14	172	5
217	Kota Magelang	45,18	85,52	85,03	71,84	260	5
218	Kota Surakarta	38,81	79,07	87,91	68,54	349	4
219	Kota Salatiga	62,03	86,82	89,27	79,33	61	6
220	Kota Semarang	43,29	88,56	91,22	74,28	199	5
221	Kota Pekalongan	54,11	83,91	72,79	70,20	303	5
222	Kota Tegal	34,39	88,06	87,43	69,87	308	5
DI YOGYAKARTA							
223	Kulon Progo	60,40	76,67	79,94	72,31	245	5
224	Bantul	66,18	79,46	84,85	76,82	123	5
225	Gunungkidul	62,75	78,18	73,57	71,47	269	5
226	Sleman	86,94	82,82	86,68	85,50	7	6
227	Kota Yogyakarta	45,65	86,18	84,70	72,11	251	5
JAWA TIMUR							
228	Pacitan	58,32	79,11	78,89	72,07	255	5
229	Ponorogo	49,24	84,85	79,77	71,22	280	5
230	Trenggalek	75,45	78,01	77,02	76,82	122	5
231	Tulungagung	62,69	82,56	79,31	74,82	180	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
232	Blitar	49,78	82,15	77,38	69,71	319	5
233	Kediri	48,49	83,11	81,98	71,14	281	5
234	Malang	58,76	77,55	73,09	69,76	313	5
235	Lumajang	62,38	83,49	74,03	73,25	222	5
236	Jember	54,52	81,80	69,45	68,52	350	4
237	Banyuwangi	63,76	87,42	81,82	77,62	103	6
238	Bondowoso	56,17	79,78	76,32	70,71	293	5
239	Situbondo	58,01	80,64	76,50	71,67	263	5
240	Probolinggo	60,37	78,23	66,03	68,16	357	4
241	Pasuruan	55,16	85,39	72,19	70,84	289	5
242	Sidoarjo	53,96	90,81	86,80	77,12	113	5
243	Mojokerto	76,95	85,61	83,89	82,14	32	6
244	Jombang	78,09	83,48	81,25	80,93	44	6
245	Nganjuk	59,28	82,60	79,22	73,66	211	5
246	Madiun	61,02	82,92	81,89	75,24	169	5
247	Magetan	69,12	81,51	84,33	78,30	87	6
248	Ngawi	64,74	81,01	84,02	76,57	128	5
249	Bojonegoro	52,33	82,93	81,62	72,24	249	5
250	Tuban	56,09	79,37	84,33	73,23	224	5
251	Lamongan	61,04	83,42	86,81	77,06	114	5
252	Gresik	63,50	86,52	85,48	78,46	85	6
253	Bangkalan	51,69	76,24	58,14	61,95	426	4
254	Sampang	54,82	75,35	60,16	63,38	415	4
255	Pamekasan	45,00	82,23	63,64	63,53	414	4
256	Sumenep	71,10	75,77	73,68	73,50	215	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
257	Kota Kediri	41,60	87,43	82,46	70,41	298	5
258	Kota Blitar	38,81	86,24	83,89	69,56	322	5
259	Kota Malang	26,05	89,50	85,00	66,73	375	4
260	Kota Probolinggo	46,69	87,91	71,41	68,57	346	4
261	Kota Pasuruan	48,22	89,74	76,70	71,46	270	5
262	Kota Mojokerto	35,72	90,28	80,57	68,75	343	4
263	Kota Madiun	52,15	88,34	92,61	77,65	100	6
264	Kota Surabaya	37,43	86,62	95,99	73,28	219	5
265	Kota Batu	48,52	91,08	79,91	73,08	229	5
BANTEN							
266	Pandeglang	57,59	82,25	56,14	65,24	394	4
267	Lebak	76,85	86,02	62,77	75,16	171	5
268	Tangerang	74,04	85,52	78,70	79,39	58	6
269	Serang	80,06	90,89	75,54	82,12	33	6
270	Kota Tangerang	66,70	87,23	90,44	81,43	41	6
271	Kota Cilegon	59,80	87,97	80,87	76,15	143	5
272	Kota Serang	76,62	84,03	74,99	78,52	83	6
273	Kota Tangerang Selatan	62,71	87,52	84,63	78,24	88	6
BALI							
274	Jembrana	62,39	87,54	84,34	78,04	94	6
275	Tabanan	69,99	90,60	72,98	77,79	98	6
276	Badung	89,61	89,48	87,27	88,79	1	6
277	Gianyar	67,24	93,91	88,93	83,31	21	6
278	Klungkung	58,10	87,32	76,15	73,79	210	5
279	Bangli	62,91	93,31	66,59	74,17	201	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
280	Karangasem	76,01	86,17	65,15	75,72	157	5
281	Buleleng	63,12	86,02	78,31	75,76	155	5
282	Kota Denpasar	67,12	93,68	90,72	83,79	16	6
NUSA TENGGARA BARAT							
283	Lombok Barat	62,84	81,02	76,74	73,50	216	5
284	Lombok Tengah	74,43	81,18	69,68	75,07	175	5
285	Lombok Timur	73,91	77,40	59,87	70,36	300	5
286	Sumbawa	65,09	80,30	78,48	74,59	188	5
287	Dompu	70,37	86,03	76,24	77,50	105	6
288	Bima	90,35	79,56	64,07	77,98	96	6
289	Sumbawa Barat	84,03	81,47	75,70	80,40	46	6
290	Lombok Utara	95,84	73,36	61,65	76,97	116	5
291	Kota Mataram	69,39	86,49	78,73	78,16	90	6
292	Kota Bima	89,50	85,96	70,46	81,96	36	6
NUSA TENGGARA TIMUR							
293	Kupang	46,11	71,62	60,98	59,51	444	3
294	Timor Tengah Selatan	42,12	70,49	57,02	56,47	458	3
295	Timor Tengah Utara	47,97	73,65	54,30	58,57	448	3
296	Belu	45,30	75,27	49,28	56,52	457	3
297	Alor	46,16	78,02	43,25	55,70	465	3
298	Flores Timur	46,86	74,92	56,15	59,23	445	3
299	Sikka	49,85	75,11	60,63	61,80	430	4
300	Ende	45,97	74,79	68,58	63,06	420	4
301	Ngada	56,46	76,50	61,35	64,71	402	4
302	Manggarai	54,52	75,21	55,08	61,54	433	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
303	Sumba Timur	51,77	68,09	51,12	56,94	456	3
304	Sumba Barat	43,88	71,80	49,83	55,09	468	3
305	Lembata	39,91	69,88	53,20	54,25	474	3
306	Rote Ndao	40,19	63,62	62,34	55,34	466	3
307	Manggarai Barat	51,30	75,43	56,14	60,88	437	3
308	Nagekeo	42,18	73,97	57,31	57,74	453	3
309	Sumba Tengah	50,01	63,29	46,99	53,38	476	2
310	Sumba Barat Daya	43,75	68,65	35,55	49,22	486	2
311	Manggarai Timur	49,24	71,67	58,12	59,62	442	3
312	Sabu Raijua	44,50	69,53	40,55	51,43	480	2
313	Malaka	52,07	78,36	48,53	59,56	443	3
314	Kota Kupang	25,59	79,79	74,60	59,89	439	3
KALIMANTAN BARAT							
315	Sambas	61,14	86,66	52,21	66,57	378	4
316	Mempawah	81,23	82,41	59,41	74,31	197	5
317	Sanggau	74,34	85,66	67,55	75,80	154	5
318	Ketapang	65,53	82,80	71,37	73,19	225	5
319	Sintang	74,38	75,56	59,26	69,70	320	5
320	Kapuas Hulu	50,21	86,37	68,53	68,28	355	4
321	Bengkayang	68,66	87,54	69,32	75,11	174	5
322	Landak	63,62	82,65	63,76	69,95	305	5
323	Sekadau	78,77	83,51	66,39	76,19	140	5
324	Melawi	63,77	80,63	62,16	68,79	342	4
325	Kayong Utara	83,62	84,84	61,30	76,55	129	5
326	Kubu Raya	60,70	83,74	55,28	66,49	379	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
327	Kota Pontianak	61,87	87,64	70,19	73,16	227	5
328	Kota Singkawang	79,44	86,40	66,70	77,47	106	6
KALIMANTAN TENGAH							
329	Kotawaringin Barat	56,71	84,96	76,27	72,58	242	5
330	Kotawaringin Timur	82,00	89,39	72,77	81,35	42	6
331	Kapuas	74,54	87,06	63,08	74,83	179	5
332	Barito Selatan	55,40	88,11	63,86	69,03	333	4
333	Barito Utara	53,60	87,50	77,33	72,73	238	5
334	Katingan	81,99	87,58	59,97	76,46	130	5
335	Seruyan	49,46	82,46	62,49	64,72	401	4
336	Sukamara	50,70	86,63	70,51	69,19	328	4
337	Lamandau	53,68	90,65	72,82	72,29	246	5
338	Gunung Mas	57,83	85,28	65,38	69,42	325	4
339	Pulang Pisau	74,30	82,81	61,17	72,71	239	5
340	Murung Raya	36,89	87,12	59,63	61,09	435	3
341	Barito Timur	66,87	87,36	67,96	74,00	204	5
342	Kota Palangkaraya	57,51	89,55	81,30	76,05	149	5
KALIMANTAN SELATAN							
343	Tanah Laut	88,07	85,81	65,90	79,90	52	6
344	Kotabaru	86,30	85,75	74,64	82,21	31	6
345	Banjar	93,65	88,91	71,61	84,70	9	6
346	Barito Kuala	87,21	88,95	77,18	84,42	11	6
347	Tapin	80,30	88,39	79,19	82,60	25	6
348	Hulu Sungai Selatan	95,97	84,17	73,52	84,56	10	6
349	Hulu Sungai Tengah	96,08	84,74	76,17	85,67	6	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
350	Hulu Sungai Utara	82,13	83,35	73,79	79,74	54	6
351	Tabalong	91,33	84,83	79,51	85,23	8	6
352	Tanah Bumbu	89,59	90,41	69,65	83,18	23	6
353	Balangan	93,48	86,02	79,76	86,42	4	6
354	Kota Banjarmasin	64,44	83,74	82,28	76,78	124	5
355	Kota Banjarbaru	63,26	84,47	83,37	77,00	115	5
KALIMANTAN TIMUR							
356	Paser	84,88	85,98	79,54	83,46	20	6
357	Kutai Kartanegara	87,33	84,87	87,27	86,50	3	6
358	Berau	78,58	85,34	82,13	82,00	35	6
359	Kutai Barat	75,34	85,05	73,71	78,00	95	6
360	Kutai Timur	77,68	85,25	77,66	80,17	49	6
361	Penajam Paser Utara	80,68	86,84	79,24	82,23	29	6
362	Mahakam Ulu	58,74	76,24	64,08	66,31	384	4
363	Kota Balikpapan	64,23	89,23	83,48	78,93	71	6
364	Kota Samarinda	61,66	86,01	85,36	77,63	102	6
365	Kota Bontang	59,79	87,26	86,90	77,94	97	6
KALIMANTAN UTARA							
366	Bulungan	59,86	76,36	76,31	70,82	290	5
367	Malinau	57,54	84,42	64,78	68,84	339	4
368	Nunukan	69,99	82,61	75,58	76,03	150	5
369	Tana Tidung	38,18	85,16	71,46	64,83	398	4
370	Kota Tarakan	51,75	84,55	82,57	72,90	234	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
SULAWESI UTARA							
371	Bolaang Mongondow	87,12	83,77	66,43	79,08	67	6
372	Minahasa	64,96	85,19	71,47	73,81	207	5
373	Kepulauan Sangihe	44,22	83,57	64,73	64,08	407	4
374	Kepulauan Talaud	50,65	86,51	60,96	65,94	388	4
375	Minahasa Selatan	57,97	80,28	62,98	67,01	369	4
376	Minahasa Utara	80,26	86,80	71,86	79,60	57	6
377	Minahasa Tenggara	66,65	79,24	68,53	71,43	273	5
378	Bolaang Mongondow Utara	79,87	82,02	63,16	74,98	178	5
379	Kep. Siau Tagulandang Biaro	31,34	84,59	59,48	58,34	451	3
380	Bolaang Mongondow Timur	55,02	87,70	62,52	68,32	354	4
381	Bolaang Mongondow Selatan	78,19	79,67	63,84	73,87	206	5
382	Kota Manado	42,03	89,31	80,88	70,64	296	5
383	Kota Bitung	63,54	88,96	68,58	73,62	212	5
384	Kota Tomohon	79,85	84,91	75,57	80,08	50	6
385	Kota Kotamobagu	71,22	83,70	71,49	75,43	162	5
SULAWESI TENGAH							
386	Banggai	73,79	82,15	73,19	76,35	134	5
387	Poso	57,22	77,11	71,86	68,69	344	4
388	Donggala	63,66	60,02	62,12	61,94	427	4
389	Toli-Toli	55,84	72,93	69,55	66,07	386	4
390	Buol	60,47	76,50	66,08	67,64	363	4
391	Morowali	82,05	80,26	70,34	77,54	104	6
392	Banggai Kepulauan	67,81	75,36	66,11	69,73	316	5
393	Parigi Moutong	68,50	78,68	65,80	70,96	286	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
394	Tojo Una Una	57,72	73,25	76,80	69,24	327	4
395	Sigi	79,58	79,73	69,45	76,23	136	5
396	Banggai Laut	55,95	74,70	62,43	64,31	404	4
397	Morowali Utara	62,57	82,52	70,30	71,75	262	5
398	Kota Palu	50,97	86,10	72,37	69,73	315	5
SULAWESI SELATAN							
399	Kepulauan Selayar	63,60	80,99	70,01	71,49	268	5
400	Bulukumba	88,30	81,76	75,53	81,87	37	6
401	Bantaeng	88,27	86,90	77,41	84,18	12	6
402	Jeneponto	76,84	81,57	69,62	75,98	153	5
403	Takalar	68,36	83,90	60,73	70,93	287	5
404	Gowa	70,64	88,36	79,28	79,38	59	6
405	Sinjai	75,53	84,42	68,57	76,13	144	5
406	Bone	54,24	81,62	67,29	67,65	362	4
407	Maros	63,72	83,29	70,41	72,42	243	5
408	Pangkajene dan Kepulauan	76,70	81,84	78,33	78,94	70	6
409	Barru	70,80	84,47	63,30	72,80	237	5
410	Soppeng	75,72	84,14	74,66	78,14	91	6
411	Wajo	72,59	87,44	63,17	74,33	196	5
412	Sidenreng Rappang	66,22	89,05	71,97	75,68	158	5
413	Pinrang	63,67	86,73	73,99	74,74	183	5
414	Enrekang	61,73	78,34	65,73	68,55	348	4
415	Luwu	66,07	80,16	68,24	71,45	271	5
416	Tana Toraja	49,32	80,29	55,74	61,69	431	4
417	Luwu Utara	81,01	81,61	70,34	77,63	101	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
418	Luwu Timur	65,85	71,34	69,24	68,80	341	4
419	Toraja Utara	50,50	81,70	58,17	63,37	416	4
420	Kota Makassar	59,61	84,52	85,24	76,42	132	5
421	Kota Parepare	60,62	86,45	79,09	75,33	166	5
422	Kota Palopo	67,79	78,14	84,63	76,85	121	5
SULAWESI TENGGARA							
423	Kolaka	64,53	78,69	69,30	70,80	291	5
424	Konawe	82,41	80,21	70,40	77,66	99	6
425	Muna	41,71	71,57	50,17	54,40	473	3
426	Buton	55,67	77,24	64,39	65,71	392	4
427	Konawe Selatan	69,47	73,58	64,26	69,08	332	4
428	Bombana	66,46	81,47	67,23	71,67	264	5
429	Wakatobi	77,19	76,08	56,36	69,85	310	5
430	Kolaka Utara	49,91	81,94	69,32	66,98	370	4
431	Konawe Utara	58,11	84,23	64,39	68,84	340	4
432	Buton Utara	64,12	69,64	60,77	64,82	399	4
433	Kolaka Timur	84,55	83,63	72,77	80,30	48	6
434	Konawe Kepulauan	25,00	58,39	55,92	46,38	491	2
435	Muna Barat	48,00	74,00	53,29	58,35	450	3
436	Buton Tengah	38,25	75,46	54,60	56,01	464	3
437	Buton Selatan	57,38	77,92	56,35	63,81	408	4
438	Kota Kendari	37,70	84,87	86,73	69,69	321	5
439	Kota Bau-Bau	44,95	82,48	65,46	64,21	406	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
GORONTALO							
440	Gorontalo	56,84	72,62	71,71	67,03	368	4
441	Boalemo	57,92	71,39	80,05	69,78	311	5
442	Bone Bolango	64,09	75,71	76,77	72,17	250	5
443	Pohuwato	78,37	70,99	74,83	74,75	182	5
444	Gorontalo Utara	65,99	72,10	61,77	66,59	376	4
445	Kota Gorontalo	52,63	82,43	79,28	71,39	274	5
SULAWESI BARAT							
446	Pasangkayu	39,34	83,28	59,62	60,63	438	3
447	Mamuju	81,44	83,32	67,05	77,24	110	5
448	Mamasa	48,04	86,11	45,37	59,71	441	3
449	Polewali Mandar	59,31	75,63	59,45	64,74	400	4
450	Majene	62,32	78,16	66,52	68,96	335	4
451	Mamuju Tengah	61,09	87,37	60,99	69,73	317	5
MALUKU							
452	Maluku Tengah	50,76	65,66	72,39	62,92	421	4
453	Maluku Tenggara	47,60	66,31	55,50	56,42	459	3
454	Kepulauan Tanimbar	17,10	61,41	48,97	42,40	499	1
455	Buru	49,34	72,57	55,19	58,97	447	3
456	Seram Bagian Timur	52,03	70,37	48,61	56,94	455	3
457	Seram Bagian Barat	39,12	64,85	64,81	56,22	463	3
458	Kepulauan Aru	24,23	64,79	46,77	45,16	496	1
459	Maluku Barat Daya	47,61	59,99	56,63	54,72	470	3
460	Buru Selatan	33,23	69,45	44,11	48,83	487	2
461	Kota Ambon	28,86	81,12	80,87	63,53	413	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
462	Kota Tual	28,55	64,52	58,87	50,58	482	2
MALUKU UTARA							
463	Halmahera Barat	20,59	78,23	60,87	53,10	477	2
464	Halmahera Tengah	38,68	76,27	58,25	57,64	454	3
465	Halmahera Utara	42,68	79,24	63,77	61,81	429	4
466	Halmahera Selatan	26,91	82,01	56,21	54,91	469	3
467	Kepulauan Sula	23,20	72,77	54,64	50,09	483	2
468	Halmahera Timur	63,88	76,14	62,04	67,31	366	4
469	Pulau Morotai	46,26	80,13	63,87	63,34	419	4
470	Pulau Taliabu	23,86	73,38	52,17	49,69	484	2
471	Kota Ternate	34,16	80,12	78,72	64,26	405	4
472	Kota Tidore Kepulauan	22,53	79,86	66,64	56,22	462	3
PAPUA							
473	Jayapura	53,92	74,86	65,87	64,83	397	4
474	Kepulauan Yapen	43,49	54,22	59,55	52,41	479	2
475	Biak Numfor	25,62	68,86	54,61	49,60	485	2
476	Sarmi	49,85	68,10	57,65	58,49	449	3
477	Keerom	43,52	68,99	56,65	56,32	461	3
478	Waropen	30,93	53,56	51,64	45,34	495	1
479	Supiori	36,36	52,76	49,38	46,13	494	2
480	Mamberamo Raya	45,31	50,67	44,99	46,97	489	2
481	Kota Jayapura	28,25	84,48	71,25	61,21	434	3
PAPUA BARAT							
482	Manokwari	66,35	73,40	62,63	67,43	364	4
483	Fak Fak	25,14	76,73	57,10	52,87	478	2

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
484	Teluk Bintuni	29,58	71,80	59,72	53,61	475	3
485	Teluk Wondama	48,76	53,80	50,65	51,06	481	2
486	Kaimana	60,37	75,03	63,87	66,38	382	4
487	Manokwari Selatan	51,83	66,40	61,42	59,85	440	3
488	Pegunungan Arfak	9,00	58,20	32,44	33,09	505	1
PAPUA SELATAN							
489	Merauke	64,32	63,60	68,72	65,56	393	4
490	Boven Digoel	23,46	58,72	57,53	46,51	490	2
491	Mappi	25,57	63,09	38,72	42,36	500	1
492	Asmat	42,25	56,04	40,36	46,17	493	2
PAPUA TENGAH							
493	Nabire	45,28	64,44	67,35	59,00	446	3
494	Puncak Jaya	23,24	60,31	36,73	39,99	501	1
495	Paniai	15,65	45,00	21,41	27,27	511	1
496	Mimika	52,11	71,67	65,01	62,88	422	4
497	Puncak	8,35	47,71	15,56	23,75	513	1
498	Dogiyai	20,85	53,70	34,70	36,33	503	1
499	Intan Jaya	15,27	50,86	16,23	27,34	510	1
500	Deiyai	18,94	43,06	25,10	28,96	508	1
PAPUA PEGUNUNGAN							
501	Jayawijaya	36,73	51,93	39,00	42,51	498	1
502	Pegunungan Bintang	21,59	45,13	33,30	33,28	504	1
503	Yahukimo	20,27	31,82	30,20	27,41	509	1
504	Tolikara	43,88	35,21	14,30	31,11	507	1
505	Mamberamo Tengah	14,84	35,81	28,68	26,40	512	1

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
506	Yalimo	21,46	51,79	39,23	37,42	502	1
507	Lanny Jaya	24,42	43,79	26,49	31,51	506	1
508	Nduga	10,29	31,15	18,52	19,93	514	1
PAPUA BARAT DAYA							
509	Sorong	39,46	68,25	58,14	55,22	467	3
510	Sorong Selatan	24,61	71,41	42,92	46,19	492	2
511	Raja Ampat	47,23	76,21	50,10	57,75	452	3
512	Tambrau	17,17	65,24	50,57	44,22	497	1
513	Maybrat	34,57	58,53	52,80	48,58	488	2
514	Kota Sorong	37,69	81,27	69,12	62,60	424	4

Keterangan:

- Jumlah Kabupaten dan Kota adalah 514
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik

1	Sangat rentan
2	Rentan
3	Agak rentan
4	Agak tahan
5	Tahan
6	Sangat tahan

Lampiran 2. Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2024 (*Backcasting*)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
ACEH							
1	Aceh Selatan	76,67	75,65	58,16	70,13	268	5
2	Aceh Tenggara	61,60	72,76	60,69	64,98	376	4
3	Aceh Timur	58,26	76,88	68,39	67,80	325	4
4	Aceh Tengah	50,60	79,18	73,24	67,62	330	4
5	Aceh Barat	64,55	70,52	71,28	68,78	302	4
6	Aceh Besar	61,23	80,35	73,75	71,73	219	5
7	Pidie	55,29	77,65	54,85	62,52	417	4
8	Aceh Utara	57,26	73,02	66,66	65,61	365	4
9	Simeulue	56,02	55,33	61,01	57,46	453	3
10	Aceh Singkil	38,30	74,71	61,45	58,07	448	3
11	Bireuen	59,59	83,58	72,23	71,74	217	5
12	Aceh Barat Daya	60,01	66,90	61,37	62,74	415	4
13	Gayo Lues	66,45	74,40	67,30	69,36	286	4
14	Aceh Jaya	89,58	83,46	66,43	79,81	28	6
15	Nagan Raya	73,84	73,56	69,32	72,23	192	5
16	Aceh Tamiang	76,55	74,98	65,74	72,41	188	5
17	Bener Meriah	59,40	76,49	58,38	64,70	385	4
18	Pidie Jaya	60,31	74,48	60,33	65,00	375	4
19	Kota Banda Aceh	60,21	87,11	77,22	74,79	111	5
20	Kota Sabang	37,37	74,30	83,24	64,92	377	4
21	Kota Lhokseumawe	49,53	81,53	76,24	69,04	293	4
22	Kota Langsa	51,46	83,41	71,26	68,64	306	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
23	Kota Subulussalam	45,38	69,92	63,34	59,49	436	3
SUMATERA UTARA							
24	Tapanuli Tengah	53,16	84,44	57,87	65,06	374	4
25	Tapanuli Utara	81,87	86,50	61,77	76,67	70	5
26	Tapanuli Selatan	59,85	89,71	56,75	68,67	305	4
27	Nias	56,38	76,32	52,32	61,60	422	4
28	Langkat	57,75	81,63	73,30	70,84	244	5
29	Karo	82,41	83,14	69,38	78,29	46	6
30	Deli Serdang	61,89	87,31	80,50	76,51	76	5
31	Simalungun	68,21	81,47	75,51	75,03	106	5
32	Asahan	57,92	71,56	78,51	69,32	287	4
33	Labuhanbatu	56,72	80,59	64,04	67,05	339	4
34	Dairi	59,62	86,75	67,13	71,09	235	5
35	Toba	72,60	86,37	73,70	77,51	54	6
36	Mandailing Natal	57,62	82,94	57,84	66,05	359	4
37	Nias Selatan	51,48	73,27	47,99	57,50	452	3
38	Pakpak Bharat	64,86	89,39	62,04	72,01	201	5
39	Humbang Hasundutan	73,23	85,60	70,04	76,25	82	5
40	Samosir	70,57	82,57	69,37	74,13	135	5
41	Serdang Bedagai	70,12	84,83	73,37	76,06	86	5
42	Batu Bara	55,73	81,10	69,84	68,83	299	4
43	Padang Lawas Utara	59,99	85,28	58,06	67,69	326	4
44	Padang Lawas	61,81	86,05	69,74	72,47	186	5
45	Labuhanbatu Selatan	33,10	81,71	75,29	63,27	407	4
46	Labuhanbatu Utara	60,70	80,92	76,60	72,70	178	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
47	Nias Utara	58,22	69,32	51,55	59,65	435	3
48	Nias Barat	50,54	63,27	41,54	51,73	475	2
49	Kota Medan	40,82	84,05	90,87	71,85	212	5
50	Kota Pematangsiantar	61,59	84,45	85,64	77,19	60	5
51	Kota Sibolga	35,20	78,67	76,37	63,34	406	4
52	Kota Tanjung Balai	41,56	72,87	85,00	66,44	351	4
53	Kota Binjai	48,93	85,78	83,71	72,75	176	5
54	Kota Tebing Tinggi	56,30	82,17	81,70	73,35	160	5
55	Kota Padangsidimpuan	63,04	87,94	76,70	75,83	88	5
56	Kota Gunungsitoli	46,52	73,71	59,31	59,78	434	3
SUMATERA BARAT							
57	Pesisir Selatan	71,03	81,68	76,95	76,53	75	5
58	Solok	62,45	84,88	72,10	73,08	167	5
59	Sijunjung	62,68	85,14	73,46	73,70	148	5
60	Tanah Datar	68,17	91,19	75,86	78,34	42	6
61	Padang Pariaman	52,74	87,19	72,87	70,85	241	5
62	Agam	63,27	84,21	75,78	74,37	128	5
63	Lima Puluh Kota	85,95	83,27	71,90	80,36	26	6
64	Pasaman	83,84	78,12	67,34	76,43	77	5
65	Kepulauan Mentawai	76,28	75,48	54,24	68,63	307	4
66	Dharmasraya	59,56	89,58	76,27	75,06	105	5
67	Solok Selatan	72,75	84,33	78,25	78,42	37	6
68	Pasaman Barat	77,93	86,70	71,00	78,50	35	6
69	Kota Padang	58,60	89,88	79,68	75,99	87	5
70	Kota Solok	85,38	80,36	84,23	83,34	6	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
71	Kota Sawahlunto	60,50	87,71	84,44	77,50	55	6
72	Kota Padang Panjang	58,10	83,49	81,65	74,37	127	5
73	Kota Bukittinggi	45,24	84,84	84,76	71,55	225	5
74	Kota Payakumbuh	88,17	86,85	82,70	85,90	2	6
75	Kota Pariaman	57,19	86,29	78,50	73,93	141	5
RIAU							
76	Kampar	55,34	72,72	70,43	66,13	357	4
77	Indragiri Hulu	58,35	81,16	80,96	73,45	155	5
78	Bengkalis	73,94	83,63	66,70	74,71	112	5
79	Indragiri Hilir	58,16	78,98	63,89	66,95	342	4
80	Pelalawan	60,57	75,70	84,81	73,68	149	5
81	Rokan Hulu	37,84	79,40	82,04	66,36	352	4
82	Rokan Hilir	49,55	78,55	61,18	63,02	411	4
83	Siak	61,28	83,32	82,70	75,73	91	5
84	Kuantan Singingi	55,85	82,97	72,76	70,46	258	5
85	Kepulauan Meranti	62,63	69,14	59,93	63,87	396	4
86	Kota Pekanbaru	54,56	81,65	84,12	73,40	158	5
87	Kota Dumai	45,06	81,45	73,76	66,68	346	4
JAMBI							
88	Kerinci	71,37	79,56	78,30	76,39	78	5
89	Merangin	57,44	76,64	70,75	68,23	317	4
90	Sarolangun	54,36	79,09	76,35	69,89	273	5
91	Batanghari	71,98	80,44	70,32	74,22	133	5
92	Muaro Jambi	76,78	86,48	81,23	81,47	19	6
93	Tanjung Jabung Barat	72,34	80,57	62,95	71,91	209	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
94	Tanjung Jabung Timur	75,46	81,70	61,98	73,01	169	5
95	Bungo	72,74	83,94	79,76	78,79	33	6
96	Tebo	57,43	81,60	73,67	70,85	242	5
97	Kota Jambi	57,85	77,78	87,75	74,44	124	5
98	Kota Sungai Penuh	61,91	83,07	89,58	78,16	47	6
SUMATERA SELATAN							
99	Ogan Komering Ulu	73,21	79,40	78,45	77,01	65	5
100	Ogan Komering Ilir	84,78	79,76	65,33	76,61	72	5
101	Muara Enim	77,86	77,52	76,23	77,20	59	5
102	Lahat	79,10	76,07	80,04	78,42	36	6
103	Musi Rawas	86,58	74,75	74,61	78,67	34	6
104	Musi Banyuasin	63,96	77,72	79,69	73,77	147	5
105	Banyuasin	87,68	81,07	69,04	79,25	30	6
106	Ogan Komering Ulu Timur	68,19	79,51	80,66	76,10	85	5
107	Ogan Komering Ulu Selatan	78,25	79,69	70,61	76,17	84	5
108	Ogan Ilir	79,06	77,59	76,44	77,70	51	6
109	Empat Lawang	83,34	76,60	53,08	70,98	236	5
110	Penukal Abab Lematang Ilir	79,09	78,54	60,68	72,74	177	5
111	Musi Rawas Utara	57,52	72,45	65,52	65,13	370	4
112	Kota Palembang	66,02	78,65	86,20	76,95	66	5
113	Kota Pagar Alam	82,09	79,08	62,14	74,41	125	5
114	Kota Lubuk Linggau	75,26	79,30	80,32	78,29	45	6
115	Kota Prabumulih	55,44	78,31	80,72	71,45	228	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
BENGKULU							
116	Bengkulu Selatan	67,37	71,79	59,19	66,09	358	4
117	Rejang Lebong	62,64	77,38	58,10	65,99	361	4
118	Bengkulu Utara	53,71	80,31	60,14	64,64	387	4
119	Kaur	57,59	72,25	63,39	64,37	390	4
120	Seluma	78,07	68,91	55,23	67,40	334	4
121	Mukomuko	68,77	81,00	63,73	71,12	234	5
122	Lebong	65,67	76,97	64,24	68,92	296	4
123	Kepahiang	54,81	76,72	60,09	63,81	400	4
124	Bengkulu Tengah	63,82	80,69	57,93	67,41	333	4
125	Kota Bengkulu	31,87	79,96	78,12	63,23	408	4
LAMPUNG							
126	Lampung Selatan	81,63	81,12	83,59	82,12	13	6
127	Lampung Tengah	66,11	79,89	64,60	70,15	267	5
128	Lampung Utara	54,52	77,96	59,72	64,00	392	4
129	Lampung Barat	73,45	80,88	69,26	74,50	121	5
130	Tulang Bawang	63,76	81,51	69,93	71,68	223	5
131	Tanggamus	68,05	82,83	70,06	73,60	153	5
132	Lampung Timur	56,94	79,15	76,57	70,84	243	5
133	Way Kanan	82,65	79,72	69,05	77,12	62	5
134	Pesawaran	68,72	78,34	68,77	71,91	208	5
135	Pringsewu	59,77	82,37	71,47	71,15	232	5
136	Mesuji	56,74	84,57	70,97	70,69	250	5
137	Tulang Bawang Barat	53,15	83,02	60,60	65,50	366	4
138	Pesisir Barat	72,82	81,26	58,17	70,70	249	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
139	Kota Bandar Lampung	31,74	83,21	86,44	67,05	338	4
140	Kota Metro	75,79	84,21	88,60	82,86	10	6
KEP. BANGKA BELITUNG							
141	Bangka	84,00	83,79	82,15	83,31	7	6
142	Belitung	63,65	78,82	76,54	72,98	171	5
143	Bangka Selatan	69,73	80,51	75,61	75,26	100	5
144	Bangka Tengah	64,65	77,90	79,20	73,89	143	5
145	Bangka Barat	56,60	84,39	75,91	72,24	191	5
146	Belitung Timur	66,92	82,17	76,07	75,02	107	5
147	Kota Pangkal Pinang	63,50	82,36	85,44	77,07	63	5
KEP. RIAU							
148	Bintan	50,49	86,50	77,69	71,49	227	5
149	Karimun	53,82	84,01	78,34	72,00	202	5
150	Natuna	45,98	86,32	71,91	67,98	323	4
151	Lingga	36,45	74,62	63,96	58,26	446	3
152	Kepulauan Anambas	44,34	87,30	60,33	63,87	397	4
153	Kota Batam	56,75	80,62	86,68	74,65	113	5
154	Kota Tanjung Pinang	65,16	87,13	82,79	78,32	43	6
DKI JAKARTA							
155	Kep. Seribu	36,97	77,70	71,73	62,05	420	4
156	Kota Jakarta Pusat	40,53	84,52	86,47	70,44	259	5
157	Kota Jakarta Utara	45,79	84,17	79,76	69,83	274	5
158	Kota Jakarta Barat	37,33	87,75	86,90	70,57	254	5
159	Kota Jakarta Selatan	41,24	87,21	87,41	71,87	210	5
160	Kota Jakarta Timur	42,35	86,32	88,93	72,47	185	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
JAWA BARAT							
161	Bogor	69,00	82,99	66,88	72,91	172	5
162	Sukabumi	66,06	82,80	68,24	72,31	189	5
163	Cianjur	63,17	82,53	76,46	74,01	136	5
164	Bandung	49,25	84,99	70,01	68,00	322	4
165	Garut	72,72	82,78	70,47	75,29	98	5
166	Tasikmalaya	60,07	78,99	70,26	69,73	277	5
167	Ciamis	63,94	85,89	73,26	74,30	129	5
168	Kuningan	53,82	80,82	66,65	67,03	340	4
169	Cirebon	62,36	79,85	77,63	73,25	163	5
170	Majalengka	58,83	75,75	73,66	69,38	284	4
171	Sumedang	61,80	82,15	78,67	74,16	134	5
172	Indramayu	76,20	80,55	72,91	76,54	74	5
173	Subang	65,38	83,38	75,00	74,54	119	5
174	Purwakarta	60,64	79,71	74,97	71,73	220	5
175	Karawang	66,29	77,65	79,45	74,45	123	5
176	Bekasi	62,54	82,38	78,86	74,56	118	5
177	Bandung Barat	53,76	79,63	73,53	68,92	295	4
178	Pangandaran	69,88	85,92	73,30	76,32	80	5
179	Kota Bogor	35,00	82,05	83,39	66,73	345	4
180	Kota Sukabumi	61,64	83,44	70,71	71,87	211	5
181	Kota Bandung	44,98	85,49	85,06	71,77	215	5
182	Kota Cirebon	40,12	81,08	84,50	68,50	310	4
183	Kota Bekasi	39,98	88,12	88,35	72,07	198	5
184	Kota Depok	42,89	89,90	72,77	68,41	311	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
185	Kota Cimahi	49,28	86,16	82,14	72,46	187	5
186	Kota Tasikmalaya	74,78	84,44	77,29	78,81	32	6
187	Kota Banjar	92,52	84,06	74,90	83,82	5	6
JAWA TENGAH							
188	Cilacap	53,08	76,93	75,31	68,40	312	4
189	Banyumas	53,33	78,15	77,45	69,60	278	5
190	Purbalingga	55,46	77,18	73,90	68,80	301	4
191	Banjarnegara	58,04	75,45	77,38	70,27	264	5
192	Kebumen	53,93	73,74	75,37	67,65	328	4
193	Purworejo	51,03	75,52	78,37	68,27	315	4
194	Wonosobo	61,85	75,75	78,55	72,03	199	5
195	Magelang	55,86	75,67	75,27	68,90	298	4
196	Boyolali	51,46	76,83	76,78	68,31	314	4
197	Klaten	52,99	74,63	76,53	68,02	321	4
198	Sukoharjo	52,58	81,53	78,16	70,70	248	5
199	Wonogiri	54,53	77,81	77,00	69,74	276	5
200	Karanganyar	51,17	76,70	76,99	68,25	316	4
201	Sragen	55,86	77,68	82,52	71,99	203	5
202	Grobogan	58,32	73,97	80,38	70,87	240	5
203	Blora	55,36	79,26	78,35	70,95	238	5
204	Rembang	63,02	73,19	80,45	72,22	194	5
205	Pati	65,46	82,48	78,98	75,60	93	5
206	Kudus	58,07	81,40	82,38	73,91	142	5
207	Jepara	62,02	83,05	79,51	74,82	110	5
208	Demak	61,25	79,45	86,71	75,79	89	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
209	Semarang	50,97	83,51	77,64	70,64	252	5
210	Temanggung	46,76	81,63	79,59	69,27	289	4
211	Kendal	56,53	78,73	79,37	71,51	226	5
212	Batang	62,04	82,87	75,48	73,42	157	5
213	Pekalongan	61,28	82,03	75,52	72,90	173	5
214	Pemalang	61,04	76,43	79,25	72,22	193	5
215	Tegal	53,49	79,75	77,75	70,28	263	5
216	Brebes	72,44	76,56	78,33	75,77	90	5
217	Kota Magelang	45,98	81,33	81,43	69,52	279	5
218	Kota Surakarta	27,99	77,38	88,56	64,58	388	4
219	Kota Salatiga	62,97	83,70	86,88	77,82	50	6
220	Kota Semarang	25,23	86,94	86,77	66,21	355	4
221	Kota Pekalongan	42,67	82,64	79,05	68,05	320	4
222	Kota Tegal	36,23	83,62	86,43	68,69	304	4
DI YOGYAKARTA							
223	Kulon Progo	53,14	70,72	79,11	67,64	329	4
224	Bantul	60,22	79,32	83,43	74,30	130	5
225	Gunungkidul	63,51	74,99	72,98	70,47	257	5
226	Sleman	79,10	84,45	87,99	83,84	4	6
227	Kota Yogyakarta	54,27	84,95	83,62	74,23	132	5
JAWA TIMUR							
228	Pacitan	54,40	81,87	76,11	70,74	247	5
229	Ponorogo	51,35	77,68	79,61	69,50	280	4
230	Trenggalek	65,93	77,77	72,47	72,03	200	5
231	Tulungagung	65,54	79,89	79,45	74,93	109	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
232	Blitar	48,91	77,83	68,07	64,87	380	4
233	Kediri	53,31	78,40	79,70	70,43	260	5
234	Malang	54,66	80,73	76,84	70,69	251	5
235	Lumajang	64,41	82,60	73,38	73,42	156	5
236	Jember	54,58	76,93	71,65	67,67	327	4
237	Banyuwangi	57,76	83,65	78,42	73,22	164	5
238	Bondowoso	52,62	77,25	72,90	67,54	331	4
239	Situbondo	54,73	79,60	77,27	70,49	256	5
240	Probolinggo	53,80	73,36	63,90	63,64	401	4
241	Pasuruan	57,94	82,54	75,49	71,94	206	5
242	Sidoarjo	51,38	86,99	85,72	74,63	114	5
243	Mojokerto	81,61	82,26	85,18	83,02	9	6
244	Jombang	54,20	82,99	81,49	72,84	174	5
245	Nganjuk	52,89	81,41	80,10	71,42	229	5
246	Madiun	61,37	80,21	80,50	73,99	137	5
247	Magetan	64,88	79,80	81,22	75,28	99	5
248	Ngawi	53,59	74,98	81,81	70,10	270	5
249	Bojonegoro	54,55	78,48	82,91	71,95	205	5
250	Tuban	60,82	77,53	82,68	73,66	152	5
251	Lamongan	68,33	79,10	78,18	75,19	103	5
252	Gresik	60,70	84,49	88,38	77,82	49	6
253	Bangkalan	53,18	73,79	61,80	62,87	414	4
254	Sampang	56,97	72,77	61,96	63,85	399	4
255	Pamekasan	47,91	78,88	65,32	63,96	394	4
256	Sumenep	77,11	73,21	71,03	73,79	146	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
257	Kota Kediri	40,66	80,91	72,82	64,71	383	4
258	Kota Blitar	42,27	78,78	73,73	64,86	382	4
259	Kota Malang	25,48	87,62	76,49	63,07	409	4
260	Kota Probolinggo	44,54	85,76	78,45	69,50	281	4
261	Kota Pasuruan	47,23	86,87	78,63	70,83	245	5
262	Kota Mojokerto	34,28	81,12	78,83	64,66	386	4
263	Kota Madiun	51,22	86,18	92,75	76,67	69	5
264	Kota Surabaya	34,80	84,11	93,69	70,80	246	5
265	Kota Batu	58,77	90,35	73,10	73,99	138	5
BANTEN							
266	Pandeglang	59,83	84,13	60,12	67,94	324	4
267	Lebak	74,61	83,32	58,46	72,07	197	5
268	Tangerang	72,48	84,99	77,87	78,41	38	6
269	Serang	82,64	85,39	73,92	80,62	24	6
270	Kota Tangerang	69,18	87,39	86,52	81,00	20	6
271	Kota Cilegon	62,92	89,14	79,14	77,01	64	5
272	Kota Serang	75,75	83,52	69,60	76,26	81	5
273	Kota Tangerang Selatan	59,61	86,59	85,98	77,35	56	5
BALI							
274	Jembrana	62,10	86,34	83,23	77,18	61	5
275	Tabanan	67,35	88,96	81,94	79,37	29	6
276	Badung	63,29	92,09	89,81	81,68	15	6
277	Gianyar	58,35	89,05	87,83	78,35	41	6
278	Klungkung	59,26	87,68	83,82	76,87	68	5
279	Bangli	57,67	89,79	73,20	73,47	154	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
280	Karangasem	67,50	84,42	70,97	74,24	131	5
281	Buleleng	58,00	82,83	77,39	72,69	179	5
282	Kota Denpasar	53,75	92,33	90,64	78,84	31	6
NUSA TENGGARA BARAT							
283	Lombok Barat	67,10	81,67	75,12	74,60	116	5
284	Lombok Tengah	76,24	79,18	73,76	76,38	79	5
285	Lombok Timur	76,76	79,59	73,39	76,56	73	5
286	Sumbawa	66,01	79,92	79,57	75,14	104	5
287	Dompu	67,64	78,54	77,02	74,38	126	5
288	Bima	65,53	77,53	68,14	70,36	261	5
289	Sumbawa Barat	86,77	79,81	82,46	83,03	8	6
290	Lombok Utara	94,09	69,81	67,80	77,27	57	5
291	Kota Mataram	59,69	85,28	80,79	75,20	101	5
292	Kota Bima	67,35	85,32	72,48	75,00	108	5
NUSA TENGGARA TIMUR							
293	Kupang	44,69	65,30	56,11	55,32	462	3
294	Timor Tengah Selatan	42,13	62,32	61,33	55,23	465	3
295	Timor Tengah Utara	45,24	63,04	50,84	52,99	472	2
296	Belu	44,99	65,50	56,39	55,58	461	3
297	Alor	48,91	67,18	46,32	54,07	468	3
298	Flores Timur	49,52	74,07	53,01	58,79	442	3
299	Sikka	41,22	71,32	60,21	57,51	451	3
300	Ende	50,57	67,59	62,70	60,25	431	3
301	Ngada	54,57	67,89	64,88	62,42	418	4
302	Manggarai	52,27	66,54	55,90	58,20	447	3

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
303	Sumba Timur	72,80	60,89	53,21	62,31	419	4
304	Sumba Barat	47,10	66,46	51,58	54,99	466	3
305	Lembata	49,69	65,56	50,74	55,28	464	3
306	Rote Ndao	39,62	61,42	52,83	51,24	476	2
307	Manggarai Barat	51,20	73,14	64,50	62,90	413	4
308	Nagekeo	41,82	68,84	52,13	54,19	467	3
309	Sumba Tengah	50,02	58,49	44,16	50,85	477	2
310	Sumba Barat Daya	44,45	64,58	37,12	48,64	483	2
311	Manggarai Timur	49,89	60,31	40,31	50,12	479	2
312	Sabu Raijua	75,20	66,92	45,62	62,56	416	4
313	Malaka	47,41	70,64	55,79	57,89	449	3
314	Kota Kupang	22,39	76,77	72,59	57,15	455	3
KALIMANTAN BARAT							
315	Sambas	66,82	79,45	55,87	67,32	335	4
316	Mempawah	83,88	77,98	57,49	73,09	165	5
317	Sanggau	73,24	80,36	66,27	73,26	162	5
318	Ketapang	59,56	81,29	63,85	68,17	318	4
319	Sintang	77,33	82,13	69,14	76,17	83	5
320	Kapuas Hulu	59,62	84,96	70,69	71,69	222	5
321	Bengkayang	73,45	80,13	63,35	72,27	190	5
322	Landak	66,42	80,82	63,60	70,23	266	5
323	Sekadau	63,89	79,54	62,87	68,71	303	4
324	Melawi	45,46	78,13	52,93	58,74	443	3
325	Kayong Utara	77,59	80,40	61,08	72,99	170	5
326	Kubu Raya	52,67	79,58	51,85	61,28	425	3

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
327	Kota Pontianak	59,33	80,53	69,61	69,77	275	5
328	Kota Singkawang	62,28	87,00	66,23	71,76	216	5
KALIMANTAN TENGAH							
329	Kotawaringin Barat	60,17	92,00	83,13	78,37	40	6
330	Kotawaringin Timur	59,02	87,09	70,53	72,14	196	5
331	Kapuas	63,18	83,58	74,41	73,68	150	5
332	Barito Selatan	54,84	88,89	71,91	71,80	214	5
333	Barito Utara	56,02	86,96	67,45	70,06	271	5
334	Katingan	87,24	86,59	68,24	80,66	23	6
335	Seruyan	50,90	86,83	62,00	66,47	350	4
336	Sukamara	55,97	84,73	66,25	68,90	297	4
337	Lamandau	58,88	88,45	71,26	72,79	175	5
338	Gunung Mas	57,70	82,38	70,80	70,23	265	5
339	Pulang Pisau	64,31	83,71	69,71	72,52	184	5
340	Murung Raya	42,24	86,59	66,22	64,91	379	4
341	Barito Timur	63,59	82,76	75,65	73,96	139	5
342	Kota Palangkaraya	40,24	92,44	79,32	70,56	255	5
KALIMANTAN SELATAN							
343	Tanah Laut	70,37	84,76	64,29	73,08	166	5
344	Kotabaru	85,49	90,10	71,18	82,22	12	6
345	Banjar	71,05	81,89	68,65	73,82	145	5
346	Barito Kuala	80,83	89,85	73,92	81,49	18	6
347	Tapin	78,55	92,33	76,44	82,39	11	6
348	Hulu Sungai Selatan	94,75	90,25	71,94	85,63	3	6
349	Hulu Sungai Tengah	73,12	74,41	76,08	74,54	120	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
350	Hulu Sungai Utara	64,03	79,48	64,71	69,36	285	4
351	Tabalong	89,16	82,95	73,76	81,95	14	6
352	Tanah Bumbu	70,87	89,25	74,93	78,30	44	6
353	Balangan	70,65	86,87	68,67	75,34	97	5
354	Kota Banjarmasin	63,89	89,64	80,44	77,93	48	6
355	Kota Banjarbaru	64,89	81,63	83,40	76,62	71	5
KALIMANTAN TIMUR							
356	Paser	84,54	78,55	79,69	80,94	21	6
357	Kutai Kartanegara	77,98	81,35	83,12	80,81	22	6
358	Berau	85,65	77,86	81,16	81,57	17	6
359	Kutai Barat	55,92	79,39	72,21	69,12	291	4
360	Kutai Timur	85,57	79,51	76,05	80,38	25	6
361	Penajam Paser Utara	68,53	79,45	78,29	75,40	96	5
362	Mahakam Ulu	40,45	75,86	65,71	60,60	427	3
363	Kota Balikpapan	63,02	88,06	84,27	78,40	39	6
364	Kota Samarinda	49,80	86,83	82,78	73,06	168	5
365	Kota Bontang	60,09	87,51	85,55	77,66	52	6
KALIMANTAN UTARA							
366	Bulungan	60,92	82,85	77,36	73,67	151	5
367	Malinau	52,91	83,33	62,61	66,20	356	4
368	Nunukan	61,12	82,52	64,36	69,27	288	4
369	Tana Tidung	35,14	84,81	77,58	65,75	364	4
370	Kota Tarakan	56,56	84,61	82,84	74,62	115	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
SULAWESI UTARA							
371	Bolaang Mongondow	57,67	77,33	60,98	65,27	369	4
372	Minahasa	66,40	85,22	79,24	76,91	67	5
373	Kepulauan Sangihe	46,81	79,45	69,34	65,13	371	4
374	Kepulauan Talaud	65,60	84,23	60,72	70,11	269	5
375	Minahasa Selatan	62,39	83,22	61,81	69,07	292	4
376	Minahasa Utara	86,11	85,54	73,16	81,58	16	6
377	Minahasa Tenggara	60,80	79,42	77,60	72,57	181	5
378	Bolaang Mongondow Utara	74,16	81,97	70,63	75,55	94	5
379	Kep. Siau Tagulandang Biaro	35,17	82,14	56,50	57,82	450	3
380	Bolaang Mongondow Timur	59,48	86,46	61,24	68,97	294	4
381	Bolaang Mongondow Selatan	75,77	79,75	58,68	71,36	230	5
382	Kota Manado	61,08	86,85	77,81	75,19	102	5
383	Kota Bitung	61,89	88,58	69,54	73,26	161	5
384	Kota Tomohon	85,48	88,95	85,35	86,58	1	6
385	Kota Kotamobagu	58,12	87,46	70,17	71,84	213	5
SULAWESI TENGAH							
386	Banggai	62,32	84,72	62,87	69,90	272	5
387	Poso	60,32	75,46	69,96	68,54	308	4
388	Donggala	67,60	72,99	59,16	66,55	349	4
389	Toli-Toli	51,73	81,67	58,85	63,99	393	4
390	Buol	56,99	80,33	61,95	66,36	353	4
391	Morowali	63,43	78,47	69,96	70,58	253	5
392	Banggai Kepulauan	74,76	76,67	65,07	72,14	195	5
393	Parigi Moutong	52,14	78,92	60,77	63,87	398	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
394	Tojo Una Una	47,60	77,13	66,25	63,59	402	4
395	Sigi	60,11	75,75	61,73	65,81	363	4
396	Banggai Laut	33,78	81,20	62,40	59,02	440	3
397	Morowali Utara	58,00	76,61	65,20	66,56	348	4
398	Kota Palu	50,76	85,10	72,63	69,42	283	4
SULAWESI SELATAN							
399	Kepulauan Selayar	58,79	78,08	59,63	65,44	368	4
400	Bulukumba	86,23	81,84	71,69	79,91	27	6
401	Bantaeng	65,73	79,34	78,41	74,47	122	5
402	Jeneponto	76,47	74,95	72,26	74,56	117	5
403	Takalar	71,23	82,38	62,31	71,92	207	5
404	Gowa	67,42	82,20	66,45	71,97	204	5
405	Sinjai	75,95	79,22	71,11	75,41	95	5
406	Bone	54,99	79,23	66,94	66,99	341	4
407	Maros	64,69	81,06	72,05	72,56	182	5
408	Pangkajene dan Kepulauan	76,54	79,78	75,36	77,21	58	5
409	Barru	60,15	80,95	73,67	71,55	224	5
410	Soppeng	65,77	77,67	69,46	70,93	239	5
411	Wajo	65,97	82,79	71,53	73,38	159	5
412	Sidenreng Rappang	60,49	86,41	66,73	71,14	233	5
413	Pinrang	62,41	80,40	72,52	71,74	218	5
414	Enrekang	61,99	77,54	71,48	70,30	262	5
415	Luwu	65,19	79,88	60,70	68,53	309	4
416	Tana Toraja	55,41	79,73	56,86	63,92	395	4
417	Luwu Utara	79,21	79,91	73,65	77,58	53	6

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
418	Luwu Timur	69,05	77,48	67,58	71,34	231	5
419	Toraja Utara	54,77	80,59	59,02	64,71	384	4
420	Kota Makassar	51,66	85,61	80,67	72,58	180	5
421	Kota Parepare	62,55	82,98	81,68	75,70	92	5
422	Kota Palopo	60,02	84,38	73,39	72,54	183	5
SULAWESI TENGGARA							
423	Kolaka	66,04	78,47	77,41	73,95	140	5
424	Konawe	61,67	77,78	65,76	68,35	313	4
425	Muna	47,96	66,99	52,46	55,75	460	3
426	Buton	60,59	76,25	58,56	65,07	373	4
427	Konawe Selatan	64,88	73,98	62,42	67,06	337	4
428	Bombana	59,06	80,95	61,44	67,08	336	4
429	Wakatobi	53,88	75,60	54,65	61,30	424	3
430	Kolaka Utara	50,72	73,05	65,56	63,06	410	4
431	Konawe Utara	56,27	79,98	60,33	65,45	367	4
432	Buton Utara	56,00	73,67	59,26	62,92	412	4
433	Kolaka Timur	73,99	78,35	69,35	73,87	144	5
434	Konawe Kepulauan	35,57	70,22	54,83	53,46	470	3
435	Muna Barat	51,04	72,35	52,01	58,40	444	3
436	Buton Tengah	45,91	74,78	54,75	58,40	445	3
437	Buton Selatan	55,69	74,16	50,81	60,15	432	3
438	Kota Kendari	39,31	84,03	85,26	69,46	282	4
439	Kota Bau-Bau	42,50	85,90	72,21	66,77	344	4

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
GORONTALO							
440	Gorontalo	59,38	73,69	67,68	66,88	343	4
441	Boalemo	63,71	75,15	76,29	71,70	221	5
442	Bone Bolango	50,59	72,18	77,19	66,63	347	4
443	Pohuwato	62,80	73,88	69,82	68,81	300	4
444	Gorontalo Utara	60,88	72,85	68,61	67,42	332	4
445	Kota Gorontalo	46,81	84,96	72,76	68,09	319	4
SULAWESI BARAT							
446	Pasangkayu	38,05	79,50	60,91	59,39	439	3
447	Mamuju	74,82	82,72	55,53	70,96	237	5
448	Mamasa	51,18	76,46	42,28	56,54	457	3
449	Polewali Mandar	65,59	77,09	64,93	69,16	290	4
450	Majene	53,56	77,73	62,60	64,56	389	4
451	Mamuju Tengah	54,41	82,52	55,47	64,04	391	4
MALUKU							
452	Maluku Tengah	53,94	67,97	68,22	63,35	405	4
453	Maluku Tenggara	24,14	60,73	51,23	45,29	490	1
454	Kepulauan Tanimbar	18,78	62,13	54,75	45,14	491	1
455	Buru	50,23	72,22	68,02	63,45	403	4
456	Seram Bagian Timur	56,72	64,96	61,15	60,92	426	3
457	Seram Bagian Barat	49,67	62,27	66,33	59,41	437	3
458	Kepulauan Aru	24,52	65,66	55,08	48,33	485	2
459	Maluku Barat Daya	56,62	57,25	54,24	56,03	459	3
460	Buru Selatan	32,09	66,93	45,90	48,21	486	2
461	Kota Ambon	24,74	80,12	77,09	60,55	428	3

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
462	Kota Tual	26,31	67,86	55,25	49,72	480	2
MALUKU UTARA							
463	Halmahera Barat	38,99	69,57	59,91	56,09	458	3
464	Halmahera Tengah	32,82	78,07	55,35	55,30	463	3
465	Halmahera Utara	38,03	79,23	61,22	59,40	438	3
466	Halmahera Selatan	31,13	73,77	56,60	53,73	469	3
467	Kepulauan Sula	16,68	71,18	52,15	46,55	487	2
468	Halmahera Timur	48,83	72,98	58,20	59,94	433	3
469	Pulau Morotai	51,27	78,35	69,26	66,23	354	4
470	Pulau Taliabu	33,78	68,66	53,57	51,92	474	2
471	Kota Ternate	28,79	84,53	72,28	61,75	421	4
472	Kota Tidore Kepulauan	32,92	81,69	66,94	60,41	429	3
PAPUA							
473	Jayapura	59,42	71,54	63,75	64,87	381	4
474	Kepulauan Yapen	30,67	62,35	55,22	49,35	481	2
475	Biak Numfor	22,24	64,69	47,83	44,82	494	1
476	Sarmi	49,43	62,68	59,81	57,28	454	3
477	Keerom	30,61	62,84	45,44	46,22	489	2
478	Waropen	34,82	60,01	51,61	48,76	482	2
479	Supiori	41,04	55,22	49,36	48,51	484	2
480	Mamberamo Raya	45,22	52,46	37,31	44,96	492	1
481	Kota Jayapura	43,67	78,80	72,48	64,91	378	4
PAPUA BARAT							
482	Manokwari	68,58	65,96	63,42	65,99	360	4
483	Fak Fak	26,93	71,33	53,60	50,52	478	2

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
484	Teluk Bintuni	31,85	61,96	64,96	52,88	473	2
485	Teluk Wondama	29,47	51,67	52,82	44,62	495	1
486	Kaimana	57,39	71,56	61,45	63,43	404	4
487	Manokwari Selatan	50,67	63,83	66,69	60,38	430	3
488	Pegunungan Arfak	16,35	48,36	40,57	35,03	505	1
PAPUA SELATAN							
489	Merauke	63,74	62,68	68,79	65,08	372	4
490	Boven Digoel	23,14	52,48	54,82	43,44	498	1
491	Mappi	25,85	47,59	38,18	37,16	502	1
492	Asmat	42,21	47,72	42,62	44,17	496	1
PAPUA TENGAH							
493	Nabire	48,96	68,03	67,40	61,43	423	3
494	Puncak Jaya	18,68	56,46	27,22	34,01	507	1
495	Paniai	23,26	48,80	27,91	33,25	508	1
496	Mimika	57,38	74,88	65,57	65,90	362	4
497	Puncak	9,39	55,03	33,30	32,46	509	1
498	Dogiyai	21,88	48,57	38,66	36,31	503	1
499	Intan Jaya	19,83	52,57	21,15	31,08	511	1
500	Deiyai	22,90	43,34	29,75	31,94	510	1
PAPUA PEGUNUNGAN							
501	Jayawijaya	15,95	58,28	40,84	38,26	500	1
502	Pegunungan Bintang	14,64	63,66	24,54	34,13	506	1
503	Yahukimo	13,49	46,61	33,00	30,95	512	1
504	Tolikara	21,26	51,88	17,34	30,05	514	1
505	Mamberamo Tengah	16,73	59,36	30,72	35,49	504	1

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
506	Yalimo	24,31	65,81	44,84	44,88	493	1
507	Lanny Jaya	23,88	60,69	30,26	38,16	501	1
508	Nduga	11,64	60,34	19,91	30,48	513	1
PAPUA BARAT DAYA							
509	Sorong	44,73	58,80	56,19	53,21	471	2
510	Sorong Selatan	29,51	67,80	41,99	46,32	488	2
511	Raja Ampat	53,07	66,40	51,20	56,84	456	3
512	Tambrau	19,41	56,38	56,69	44,10	497	1
513	Maybrat	19,60	62,93	46,14	42,79	499	1
514	Kota Sorong	34,30	75,47	67,39	58,97	441	3

Keterangan:

- Jumlah Kabupaten dan Kota adalah 514
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik

1	Sangat rentan
2	Rentan
3	Agak rentan
4	Agak tahan
5	Tahan
6	Sangat tahan

Lampiran 3. Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi Tahun 2025

NO.	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT
1	Aceh	62,46	81,51	66,20	70,00	25
2	Sumatera Utara	57,24	84,33	73,02	71,47	22
3	Sumatera Barat	70,07	86,23	77,00	77,72	7
4	Riau	54,90	85,08	71,49	70,42	23
5	Jambi	71,08	83,97	73,55	76,16	9
6	Sumatera Selatan	77,90	82,39	77,69	79,31	4
7	Bengkulu	63,15	80,95	65,73	69,89	26
8	Lampung	65,59	82,03	71,69	73,06	15
9	Kep. Bangka Belitung	70,64	85,76	78,31	78,20	5
10	Kep. Riau	48,81	86,72	80,56	71,96	19
11	DKI Jakarta	40,02	88,74	86,05	71,52	20
12	Jawa Barat	65,09	83,77	76,12	74,95	10
13	Jawa Tengah	59,90	81,44	79,97	73,73	13
14	DI Yogyakarta	69,21	80,59	82,57	77,44	8
15	Jawa Timur	56,43	82,94	78,80	72,67	16
16	Banten	70,63	86,46	76,39	77,78	6
17	Bali	69,57	89,81	80,43	79,89	3
18	Nusa Tenggara Barat	74,49	80,39	69,30	74,70	11
19	Nusa Tenggara Timur	45,47	73,34	56,15	58,24	32
20	Kalimantan Barat	67,18	84,15	63,41	71,52	21
21	Kalimantan Tengah	64,68	87,15	69,22	73,62	14
22	Kalimantan Selatan	84,11	86,21	75,69	81,98	1
23	Kalimantan Timur	73,45	86,21	82,87	80,82	2

NO.	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT
24	Kalimantan Utara	58,87	82,23	76,72	72,56	17
25	Sulawesi Utara	62,64	85,22	69,80	72,49	18
26	Sulawesi Tengah	64,75	77,32	69,23	70,40	24
27	Sulawesi Selatan	66,95	83,34	72,74	74,30	12
28	Sulawesi Tenggara	57,98	78,40	66,45	67,56	28
29	Gorontalo	60,96	74,30	74,05	69,75	27
30	Sulawesi Barat	60,23	80,83	60,37	67,08	29
31	Maluku	39,44	68,87	63,41	57,18	34
32	Maluku Utara	33,36	78,78	62,98	58,27	31
33	Papua	36,51	72,81	63,27	57,45	33
34	Papua Barat	46,99	70,75	58,27	58,61	30
35	Papua Selatan	46,06	61,21	54,73	53,96	36
36	Papua Tengah	28,54	57,09	39,43	41,61	37
37	Papua Pegunungan	27,17	40,27	28,57	31,96	38
38	Papua Barat Daya	36,67	74,74	60,32	57,15	35

Keterangan:

- Jumlah provinsi adalah 38
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan rasio penduduk, bobot IK, IA, dan IP
- Bobot IK = 0,335; IA = 0,330; dan IP = 0,335

Lampiran 4. Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi Tahun 2024 (*Backcasting*)

NO.	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT
1	Aceh	60,11	76,75	66,96	67,90	25
2	Sumatera Utara	57,42	82,67	74,41	71,45	18
3	Sumatera Barat	67,18	85,68	75,30	76,00	7
4	Riau	55,73	79,24	74,08	69,64	22
5	Jambi	65,84	80,75	76,24	74,25	10
6	Sumatera Selatan	75,02	78,42	75,48	76,30	6
7	Bengkulu	57,45	77,11	63,28	65,89	27
8	Lampung	62,22	80,90	72,73	71,91	16
9	Kep. Bangka Belitung	68,43	81,64	79,24	76,41	5
10	Kep. Riau	55,17	82,29	82,30	73,21	11
11	DKI Jakarta	41,34	86,27	86,30	71,23	19
12	Jawa Barat	59,64	82,77	74,68	72,31	14
13	Jawa Tengah	55,08	78,56	78,80	70,78	21
14	DI Yogyakarta	65,29	79,58	82,25	75,69	8
15	Jawa Timur	55,09	80,24	77,91	71,04	20
16	Banten	70,63	85,39	75,02	76,97	4
17	Bali	60,41	88,10	82,71	77,02	3
18	Nusa Tenggara Barat	72,29	79,75	74,49	75,49	9
19	Nusa Tenggara Timur	46,42	67,08	55,48	56,27	34
20	Kalimantan Barat	64,91	80,69	62,34	69,26	23
21	Kalimantan Tengah	58,15	87,05	72,52	72,50	13
22	Kalimantan Selatan	73,90	85,78	73,30	77,62	1
23	Kalimantan Timur	68,35	83,17	81,28	77,57	2

NO.	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT
24	Kalimantan Utara	57,57	83,49	73,83	71,57	17
25	Sulawesi Utara	64,04	84,24	70,80	72,97	12
26	Sulawesi Tengah	57,39	79,27	64,30	66,92	26
27	Sulawesi Selatan	64,17	81,22	70,73	72,00	15
28	Sulawesi Tenggara	54,75	77,04	65,49	65,70	28
29	Gorontalo	57,16	75,50	71,30	67,95	24
30	Sulawesi Barat	59,50	79,05	58,73	65,70	29
31	Maluku	39,89	68,15	64,20	57,36	31
32	Maluku Utara	34,27	76,55	61,36	57,30	32
33	Papua	41,09	70,12	61,15	57,39	30
34	Papua Barat	47,00	64,29	59,66	56,95	33
35	Papua Selatan	45,88	54,94	54,84	51,87	36
36	Papua Tengah	31,58	58,61	41,75	43,91	37
37	Papua Pegunungan	17,59	55,64	30,78	34,56	38
38	Papua Barat Daya	36,17	68,60	58,99	54,52	35

Keterangan:

- Jumlah provinsi adalah 38
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan rasio penduduk, bobot IK, IA, dan IP
- Bobot IK = 0,335; IA = 0,330; dan IP = 0,335



Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan, 12550
Email: nfa_official@badanpangan.go.id
Telp/Fax: (021) 7807377